

**ANALISIS KEBIJAKAN TATA KELOLA
PERGUDANGAN LOGISTIK DAN PERALATAN
KEBENCANAAN DI BPBD PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akademik Dan Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata-1
Program Studi Administrasi Publik**



Disusun Oleh :

Alvia Nova Hariyani

2018020002

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA**

2022

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN TATA KELOLA
PERGUDANGAN LOGISTIK DAN PERALATAN
KEBENCANAAN DI BPBD PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh :

Alvia Nova Hariyani

2018020002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS DR. SOETOMO

SURABAYA

2022

Menyetujui

Pembimbing,

Dr. Hendro Wardhono, M.Si

NIP : 196809101993031001

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN TATA KELOLA PERGUDANGAN LOGISTIK DAN PERALATAN KEBENCANAAN DI BPBD PROVINSI JAWA TIMUR

Disusun oleh

Alvia Nova Hariyani

2018020002

Telah dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji

Pada Tanggal 18 Februari 2022 dan dinyatakan

Telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Penguji I : Dr. Hendro Wardhono, M. Si

Penguji II : Drs. Basuki Nugroho, M. Si

Penguji III : Widyawati, S.Sos, M.Si

Surabaya, 18 Februari 2022

Universitas Dr. Soetomo

Fakultas Ilmu Administrasi

Dekan,

Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd

NIDN. 0712115201

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 17 Februari 2022

Mahasiswa,

Alvia Nova Hariyani

NIM : 2018020002

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Dr. Soetomo

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tahapan penyusunan Skripsi yang berjudul Analisis Kebijakan Tata Kelola Pergudang Logistik dan Kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur. Penyelesaian karya ilmiah ini juga dibantu oleh beberapa pihak. Karenanya pada kali ini saya patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Siti Marwiyah, S.H, M.H selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan persetujuan kepada kami untuk mengikuti program studi Ilmu Administrasi Publik;
2. Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan berbagai fasilitas dalam mengikuti program studi Ilmu Administrasi Publik;
3. Sri Roekminiati, S.Sos, M.KP. Selaku kepala program studi Ilmu Administrasi Negara, yang telah memberikan bimbingan teknis dan akademik mengikuti perkuliahan pada program studi Ilmu Administrasi Negara;
4. Dr. Hendro Wardhono, M.Si, sebagai pembimbing yang dengan sabar membimbing kami, sehingga kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini;
5. Seluruh dosen pengampuh di program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah kanzah keilmuan penulis, khususnya dalam penyusunan karya ilmiah ini;

6. Orang tua dan Keluarga yang selalu menyemangati dan memberikan dana secara ikhlas demi kelancaran pendidikan penulis;
7. Sahabat-sahabat seperjuangan bimbingan Karina Herdiana, Nazilatul Maulida, Dewi Masita, Shella Dennisa yang tidak pernah mengeluh dan sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penulisan skripsi.

Akhirnya semoga, amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini mendapat balasan dari Allah SWT sebagai amal yang baik. Terima Kasih

Surabaya, 17 Februari 2022

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tahapan penyusunan Skripsi yang berjudul Analisis Kebijakan Tata Kelola Pergudangan Logistik dan Kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur. Maksud dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui analisis kebijakan tata kelola pergudangan logistik dan kebencanaan di BPBD provinsi Jawa Timur dalam melakukan kebijakan tata kelola.

Selama penelitian dan penulisan skripsi berlangsung banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi parapembaca pada umumnya.

Terima Kasih

Surabaya, 17 Februari 2022

Alvia Nova Hariyani

NIM : 2018020002

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN UJIAN | iii |
| PERNYATAAN ORIGINALITAS..... | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| <i>ABSTRACT</i> | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Penelitian Tedahulu | 8 |
| 2.2 Analisis Kebijakan | 10 |
| 2.3 Governance (Tata Kelola) | 12 |
| 2.4 Manajemen Bencana | 15 |

| | |
|--|-----------|
| 2.5 Manajemen Pergudangan | 20 |
| 2.6 <i>Warehouse Management System (WMS)</i> | 23 |
| 2.7 <i>Stock Take</i> | 25 |
| 2.8 Aplikasi Akuntansi Accurate..... | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 36 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 36 |
| 3.3 Informan Penelitian | 37 |
| 3.4 Lokasi Penelitian | 37 |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data | 37 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 42 |
| 4.1.1 Profil BPBD..... | 42 |
| 4.1.2 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 42 |
| 4.1.3 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jawa Timur | 43 |
| 4.1.4 Struktur Pengelolaan Logistik & Peralatan | 44 |
| 4.2 Hasil Penelitian..... | 44 |
| 4.2.1 Analisis Kebijakan tata kelola pergudangan sesuai perka BNPB Pasal 7 tahun 2008 | 45 |
| 4.2.2 Analisis Kebijakan tata kelola pergudangan, logistik dan peralatan BPBD Jawa Timur..... | 46 |

| | |
|---|----|
| 4.2.3 Perawatan Logistik | 51 |
| 4.2.4 Faktor Penghambat dan Pendukung tata kelola pergudangan dan logistik | 54 |
| 4.2.5 Rekomendasi kebijakan tata kelola Pergudangan dan logistik | 55 |
| 4.2.6 Sisem Pencacatan Administrasi Pergudangan | 56 |
| 4.2.7 Evaluasi Penggunaan Software Accurate | 58 |
| 4.3 Pembahasan | 65 |
| BAB V PENUTUP | 74 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 74 |
| 5.2 Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 76 |
| LAMPIRAN | 78 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 8 |
| Tabel 4.2 Data Rekap Stok Opname Sembako Persediaan Covid-19 Provinsi Jawa Timur | 47 |
| Tabel 4.3 Perbedaan Penggunaan Pembukuan Manual dan Menggunakan Aplikasi Accurate | 65 |
| Tabel 4.4 Tata Kelola Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur | 67 |
| Tabel 4.5 Faktor-Faktor Penghambat Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur | 69 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1 Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman | 40 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jawa Timur 2021 | 43 |
| Gambar 4.3 Struktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan | 44 |
| Gambar 4.4 <i>Ware House Management System</i> | 57 |
| Gambar 4.5 Program Accurate | 58 |
| Gambar 4.6 Proses Penataan Penerimaan Barang Datang | 70 |
| Gambar 4.7 Foto Wawancara dan Observasi | 82 |

ABSTRAK

Tata kelola pergudangan, logistik dan peralatan yang dilakukan secara baik dapat mengetahui denah, jumlah, dan jenis persediaan logistik di gudang dapat memudahkan petugas dengan cepat dan tepat untuk tanggap bencana . penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Jawa Timur dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan kebijakan tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif, fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan BPBD di Provinsi Jawa Timur. Adapun teknik pengumpulan data kualitatif meliputi : Pengamatan, Wawancara, pengumpulan Dokumen Serta Bahan Audio Visual.

Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan Tata Kelola Pergudangan Logistik dan Kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan tata kelola pengadaan logistik dan peralatan BPBD Jawa Timur didasari dengan pemenuhan dasar kebutuhan sesuai pedoman kepala BNPB No. 7 tahun 2008, yaitu : Penampung sementara, Bantuan pangan, Sandang, Air Bersih, Pelayanan Kesehatan. Sedangkan dengan prinsip : cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabilitas, kemitraan, pemerdayaan, non diskriminasi, dan Non proletasi. Faktor Penghambat dan Pendukung tata kelola pergudangan dan logistik adalah kurangnya transportasi untuk mendukung mobilitas jalannya pendistribusian, belum terdapat pengadministrasian yang terintegritas dengan setiap Kabupaten dan Kota untuk memudahkan komunikasi terkait stok barang logistik dan peralatan Rekomendasi tata kelola pergudangan logistik dan peralatan adalah monitoring dan evaluasi berupa pemantauan dari tahun ke tahun dan menyimpulkan untuk kebutuhan tahun ini akan menjadi acuan untuk kebutuhan tahun yang akan mendatang. Perlu adanya aplikasi berbasis manajemen logistik dan peralatan yang nantinya dapat terintegritas diseluruh kabupaten/kota untuk penyaluran logpal yang terencana, tepat dan berdaya guna.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Tata Kelola, dan Logistik Kebencanaan.

ABSTRACT

Good management of warehousing, logistics and equipment can determine the floor plan, quantity, and type of logistics inventory in the warehouse, making it easier for officers to quickly and accurately respond to disasters. This study aims to identify and analyze the logistics and disaster equipment warehousing management policy in the East Java BPBD and to identify and analyze the policy barriers for the logistics and disaster equipment warehousing governance policy at the East Java BPBD. The method used in this study is a qualitative research, the focus of this research is to analyze the logistics warehousing management policy and BPBD disaster equipment in East Java Province. The qualitative data collection techniques include: Observation, Interview, Document collection and Audio Visual Materials.

The results of this study are the Logistics and Disaster Warehousing Governance policy at the BPBD of East Java Province. 7 of 2008, namely: Temporary shelter, food assistance, clothing, clean water, health services. Meanwhile, the principles are: fast and precise, priority, coordination and integration, efficient and effective, transparent and accountable, partnership, empowerment, non discrimination, and non proletariat. Inhibiting and Supporting Factors for warehousing and logistics management is the lack of transportation to support the mobility of the distribution, there is no integrated administration with each Regency and City to facilitate communication related to logistics and equipment stock of goods. Recommendations for logistics and equipment warehousing management are monitoring and evaluation in the form of monitoring from year to year and conclude for this year's needs will be a reference for future year's needs. There needs to be an application based on logistics and equipment management that can later be integrated in all districts/cities for the distribution of logistics that is planned, precise and efficient.

Keywords: Policy Analysis, Governance, and Disaster Logistics.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terletak pada pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan tiga lempeng ini bergerak aktif sehingga berpotensi terhadap ancaman bencana letusan gunung berapi mengingat sekita 123 gunung aktif berada di Indonesia. Konsekuensi kondisi geologi ini menjadikan daerah di Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana letusan gunung berapi. Pentingnya sistem logistik bencana dalam aktivitas penanggulangan bencana, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan, yaitu terjadinya ketidaksesuaian dalam distribusi logistik, kelebihan stok barang untuk kebutuhan yang tidak mendesak sementara barang yang mendesak dibutuhkan justru mengalami kekurangan, kurangnya profesionalisme dan koordinasi antarpelaku penanganan bencana, serta kurangnya pemahaman akan pentingnya logistik itu sendiri (Patriatama, 2012). Pemerintah telah memperkuat kerangka untuk pencegahan bencana, kesiapsiagaan dan respon dengan menetapkan Sistem Nasional Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007) dan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB (Perpres No. 8 Tahun 2008).

Permasalahan ketidaksesuaian dalam distribusi logistik terlihat dari mekanisme distribusi barang bantuan yang kurang terarah sehingga menyebabkan lambannya proses distribusi dan tidak tepatnya barang bantuan. Sumber utama

permasalahan sistem logistik terletak pada fungsi dan koordinasi gudang logistik. Gudang utama merupakan titik persinggahan logistik dari pemasok pusat dan berfungsi untuk distribusi barang bantuan ke korban bencana. Gudang utama yang berjumlah satu namun harus mengirimkan barang bantuan ke berbagai jenis bencana yang berbeda menyebabkan tidak tercapainya kemampuan gudang dalam memenuhi kebutuhan barang bantuan pada lokasi bencana (Hehanussa, 2012). Pergudangan logistik di BPBD provinsi Jawa Timur memiliki identifikasi permasalahan sebagai berikut : (1) Tempat Penyimpanan yang kurang besardan luas, (2) Anggaran, dan (3) Sumber Daya.

Otoritas pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana diwakili oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam menjalankan peran tersebut BNPB mempunyai kemudahan akses dan koordinasi dengan organisasi yang dapat membantu sistem manajemen logistik dan peralatan untuk bencana. Fungsi penyelenggaraan Manajemen logistik dan peralatan tingkat nasional : (1) Seluruh komponen kelembagaan mematuhi dan melaksanakan sistem manajemen logistik dan peralatan yang telah ditetapkan, baik dalam keadaan prabencana, keadaan terjadi bencana, dan pascabencana. (2) Dukungan pemerintah, pemerintah tingkat provinsi, kabupaten/kota atau lembaga lain dapat dikoordinasikan sesuai dengan sistem manajemen logistik dan peralatan. (3) Menghimpun fakta dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam bentuk informasi melalui media massa yang mudah diakses. (4) Menjalankan Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana secara konsisten. (5) Sistem

logistik dan peralatan tingkat nasional merupakan pemegang sistem komando bencana dalam hal logistik dan peralatan.

BNPB adalah badan pemerintah nondepartemen yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat menteri dan lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia serta mempunyai kewenangan dalam bidang koordinasi serta mobilisasi dalam penanggulangan bencana di Indonesia secara efektif dan efisien. Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi bencana yang ada di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas-PB), BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan BNPB dan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 18 kemudian dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya menggantikan Satuan Koordinator Pelaksana (Satkorlak) dan Satuan Pelaksana (Satlak) di daerah. BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan risiko. Bisa dikatakan pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Presiden No 8 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang

melaksanakan tugas dalam penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi atau Kabupaten maupun Kota dengan pedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pengelolaan pergudangan yang baik dan benar di masa pra bencana sebagai bagian dari preparedness dapat membantu mengetahui jumlah dan jenis persediaan logistik dan peralatan di gudang dengan cepat dan tepat untuk masa tanggap bencana maupun pasca bencana. Dalam rangka penanggulangan bencana telah ditetapkan Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan agar pengelolaan logistik dan peralatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu dan akuntabel. Sementara itu, pergudangan merupakan bagian dari mata rantai pasokan, karena meliputi penerimaan, penanganan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan pemusnahan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin. Pengelolaan pergudangan yang baik dan benar di masa pra bencana sebagai bagian dari preparedness dapat membantu mengetahui jumlah dan jenis persediaan logistik dan peralatan di gudang dengan cepat dan tepat untuk masa tanggap bencana maupun pasca bencana. Berdasarkan data BNPB tahun 2013, beberapa ancaman bencana ada di provinsi ini, antara lain banjir, gempa bumi, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, gagal teknologi, konflik sosial, epidemi dan wabah penyakit. Bencana menimbulkan dampak terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk. Salah satu permasalahan yang dihadapi setelah terjadi bencana adalah pelayanan logistik terhadap korban bencana.

Permasalahan di atas menjadi dasar bagi BPBD untuk melakukan perbaikan dalam sistem logistik bencana, terutama dalam perancangan jaringan logistik dari gudang utama ke berbagai lokasi bencana. Didasari oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, BPBD Provinsi Jawa Timur berencana membangun fasilitas gudang penyalur yang belum ditetapkan dalam rantai pasok logistik. Gudang penyalur ini nantinya berfungsi dalam distribusi barang bantuan dari gudang utama ke lokasi bencana secepat mungkin. Dalam melakukan perencanaan fasilitas, Heragu (1997) memaparkan perlunya analisis mulai dari jumlah yang diperlukan, lokasi, dan luasan tiap-tiap lokasi. Hal ini menjadi dasar penelitian sebagai bentuk perencanaan fasilitas gudang penyalur oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Penentuan jumlah dan lokasi gudang penyalur sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Hehanussa (2012) dalam perancangan jaringan logistik bencana. Hasil penelitian tersebut perlu dianalisis lanjut mengingat titik lokasi gudang yang belum dianalisis. Dalam penentuan luasan gudang penyalur, perlu memperhatikan layout gudang. Perancangan layout gudang penyalur menjadi analisis dalam penentuan luasan gudang sekaligus mendukung aktivitas distribusi logistik.

Pengelolaan pergudangan yang baik dan benar di masa pra bencana sebagai bagian dari preparedness dapat membantu mengetahui jumlah dan jenis persediaan logistik dan peralatan di gudang dengan cepat dan tepat untuk masa tanggap bencana maupun paska bencana. Berdasarkan pertimbangan berbagai masalah terhadap BPBD Jawa timur, mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh

mengenai BPBD Jawa timur dengan judul “**ANALISIS KEBIJAKAN TATA KELOLA PERGUDANGAN LOGISTIK DAN PERALATAN KEBENCANAAN DI BPBD PROVINSI JAWA TIMUR**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur ?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan atau pendukung tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan tersebut ?
- 3) Bagaimana rekomendasi kebijakan tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengacu pada hal – hal yang hendak dicapai dalam suatu tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Jawa Timur.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan kebijakan tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Jawa Timur.
- 3) Untuk mengetahui rekomendasi kebijakan tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yakni :

- 1.4.1 Manfaat Teoritis, Sebagai salah satu sumber data dan informasi atau referensi dasar bagipara mahasiswa dan penelitian yang berniat melakukan penelitian dan sebagian salah satu sumber data informasi dan referensi tambahan dalam ilmu administrasi publik dan dapat digunakan salah satu bahan bacaan yang dimiliki perpustakaan.
- 1.4.2 Manfaat Praktis, Bagi instansi pemerintah dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam hal tata kelola pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan bencana di BPBD Provinsi Jawa Timur. Sebagai bahan literatur bagi kepentingan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berkaitan substansi pokok pembahasan dalam suatu penelitian ilmiah yang sangat dibutuhkan sebagai landasan berfikir untuk memudahkan dalam mencari solusi ataupun alternatif dalam memecahkan masalah-masalah yang ada. Melalui kerangka teori maka dapat disimpulkan dan menjadi acuan berfikir dalam menghadapi fenomena sosial yang ada saat ini. Teori-teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisa permasalahan yang di teliti meliputi.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Dimana penulis mengambil penelitian sebelumnya, yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil |
|-----|------------------------------|--|--|
| 1 | Asep Adang Supriyadi, (2018) | Penentuan Lokasi Gudang Pusat Penyalur Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis | Hasil dari penelitian ini adalah lokasi ideal gudang logistik kebencanaan telah melalui proses penilaian lahan dengan metode pengharkatan (<i>scoring</i>). Pengolahan data untuk menilai kondisi lahan dilakukan dengan teknik tumpang susun peta (<i>overlay</i>) dan buffering. Rancangan tata letak gudang logistik kebencanaan hasil penilaian lahan, dibuat berdasarkan metode arus garis lurus sederhana yang telah dimodifikasi. |
| 2 | Nasrullah, dkk, (2021) | Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana | Hasilnya Pengelolaan bantuan logistik bagi korban bencana pada saat tanggap darurat di |

| | | | |
|---|---------------------------|--|--|
| | | Banjir | Kota Kendari Tahun 2017 mengacu pada Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Distribusi kepada masyarakat dilaksanakan ketika instansi penyalur memiliki stok bantuan sesuai kebutuhan korban terdampak. Titik-titik pendistribusian ditentukan berdasarkan perencanaan operasi (penilaian kebutuhan) yang telah ditetapkan oleh Komando Tanggap Darurat dan dapat didukung oleh lembaga yang terlibat dalam Klaster Logistik |
| 3 | Aminah, (2020) | Analisis Pengelolaan Logistik Dalam Penanganan Darurat Bencana | Hasilnya Kegiatan pengelolaan logistik yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sumbawa belum memiliki rencana kontijensi khusus gempa sehingga penanganan logistik yang dilakukan dilapangan seadanya sehinggaperlunya dibuat rencana kontijensi lainnya yang memuat bencana gempa. Sepanjang melakukan kegiatan pengelolaan logistik saat penanganan darurat gempa 2018, BPBD Kabupaten Sumbawa sebagian besar telah mengikuti peraturan terkait logistik. Pengawasan menjadi indikator yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang terlibat, karena kurangnya koordinasi dari pihak pendonor dalam melakukan pencatatan bantuan logistik yang diberikan langsung ke suatu wilayah tertentu tanpa melakukan pelaporan kepada BPBD menjadi penghambat kelancaran operasi pengelolaan logistik. Sehingga pengawasan dan pengendalian dengan teliti dan obyektif perlu ditingkatkan lagi agar tujuan pemenuhan kebutuhan logistik korban bencana dapat tercapai. Serta perlu dilakukan pengusulan penambahan kendaraan distribusi bantuan agar pengelolaan logistik dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel. |
| 4 | Fizal Ramadhan, (2019) | Analisis Manajemen Logistik | Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa fungsi logistik yang belum maksimal. Antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolalogistik alat kesehatan sebagian besar masih dirangkap oleh petugas kesehatan puskesmas. Perencanaan masih kurang maksimal, ditandai dengan adanya kebutuhan di luar perencanaan kebutuhan. Pada saat observasi dilakukan, ada beberapa barang ada yang hanya diletakkan di aula puskesmas. Penghapusan alat kesehatan hanya sebatas pelaporan, beberapa alat kesehatan hanya diletakkan digudang alat-alat tidak terpakai. |

Sumber : Peneliti

2.2 Analisis Kebijakan

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *policy*, dan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Polis artinya kota (*city*). Istilah kebijakan juga sering disebut dengan kebijaksanaan (*Wisdom*), penggunaan kata *wisdom* dianggap tidak tepat oleh berapa pakar karena *wisdom* memiliki makna tersendiri dalam bahasa Indonesia. Menurut Syafaruddin (2008:75) kebijakan disebut (*policy*) berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Anderson (2006:6) menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan difokuskan untuk mencapai kepentingan bersama. Kebijakan dapat dimaknai pula sebagai rancangan suatu program, ide dan juga gagasan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah (Ramdhani, 2017:2). Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan-keputusan dan juga agenda-agenda yang dibuat dan disahkan oleh pihak tertentu, berdasarkan pada suatu permasalahan. Yang dalam penerapannya memiliki sisi positif dan negatif namun tetap berdasarkan pada asas yang paling utama, yaitu demi kepentingan masyarakat.

Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapapun tetap tidak

lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Dunn mengemukakan pengertian analisis kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya analisis kebijakan adalah "suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik". (Dunn, 2003:43). Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh pendapat para ahli di atas, maka analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dunn mengatakan keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu:

- 1) Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
- 2) Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
- 3) Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya.

Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. (Dunn, 2003:1). Analisis kebijakan merupakan suatu proses kognitif, sementara pembuatan kebijakan bersifat politis. Keberadaan analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Kebijakan dianggap tidak memecahkan masalah, bahkan menciptakan masalah baru. Analisis kebijakan, diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Analisis dapat dikembangkan di awal pembuatan suatu kebijakan ataupun di akhir penerapan kebijakan. Analisis kebijakan menurut Budi Winarno “berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi - konsekuensi kebijakan”. (Winarno, 2005:27). Analisis kebijakan adalah bentuk penelitian terapan yang dijadikan untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih mendalam tentang issue-issue teknik sosial yang membawakan solusi-solusi yang lebih baik.

2.3 Governance (Tata Kelola)

Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks GCG, governance disebut tata kelola perusahaan. Turnbull Report (Muh Arief Effendi, 2009:1) mendefinisikan tata kelola (governance) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Lembaga Corporate Governance di Malaysia, yaitu Finance Commitee

on Corporate Governance (GCCG) mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Muh Arief Effendi, 2009: 2). Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, dan sebagainya telah diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna. (Siswanto, 2006:24). Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu (Siswanto, 2006:3) :

1. Perencanaan (*Planning*) yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode tertentu serta tahapan/ langkah- langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap pengelola dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.
3. Pengarahan (*Directing*) yaitu suatu rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang

yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, direktur haruslah memberikan perintah dan saran kepada bawahan yang sudah ditempatkan pada posisi sesuai dengan kemampuannya. Perintah dan saran yang diberikan oleh direktur kepada bawahan tersebut harus jelas dan realistis. Karena kesamaan perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya, Salah satunya adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.

4. Pemotivasian (*Motivating*) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Direktur haruslah menyadari bahwa motivasi yang mendorong bawahan untuk mau bekerja dengan giat dan konsekuen berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan motif, tujuan, dan kebutuhan dari masing-masing individu untuk bekerja, juga karena perbedaan waktu dan tempat.

5. Pengendalian (*controlling*) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada bawahan tidaklah dimaksudkan untuk mencari kesalahan bawahan semata-mata.

Akan tetapi, hal itu dilakukan untuk membimbing bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, aktivitas pengendalian dimaksudkan untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan ke arah rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini berarti bahwa dalam mengoperasikan fungsinya, direktur berusaha membimbing bawahan ke arah terealisasinya tujuan organisasi.

2.4 Manajemen Bencana

Dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana (hazard potency) yang sangat tinggi. Beberapa potensi bencana yang ada antara lain adalah bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Bencana alam geologi merupakan kejadian alam ekstrim yang diakibatkan oleh berbagai fenomena geologi dan geofisika. Aktivitas tektonik di permukaan bumi dapat menjadi salah satu penyebabnya, demikian halnya dengan aktivitas vulkanik dibawah permukaan bumi yang juga mungkin sampai di permukaan. Pemahaman mengenai mitigasi bencana alam geologi dan mitigasi hazard menjadi menarik dan mendesak untuk diteliti mengingat dampak yang ditimbulkan bencana tersebut dewasa ini. Kerugian jiwa, material, dan budaya merupakan aspek utama yang berisiko menanggung dampak bencana. Kesadaran tentang potensi bencana di Indonesia dan fakta ilmiah di sekitar bencana yang menimpa negara ini menjadi alasan utama perlunya dilakukan usaha - usaha ilmiah untuk mengatasinya. Peran aktif

semua pihak yang terkait merupakan sikap terbaik yang diperlukan untuk menanggulangi masalah bencana.

Manajemen bencana (*Disaster Management*) sebagai penjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai bagi korban bencana, hal tersebut dilakukan untuk mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Manajemen bencana dibangun dengan maksud terselenggaranya normalisasi kehidupan masyarakat yang tercapai dengan waktu yang cepat, serta mengurangi korban nyawa dan kerugian harta benda. Hal yang penting dari manajemen bencana adalah adanya langkah nyata dalam mengendalikan bencana sehingga korban dapat terselamatkan dengan cepat dan tepat serta upaya pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan cepat (Purnomo dan Sugiantoro, 2010, h.14). Berikut ini beberapa definisi manajemen bencana dari beberapa referensi:

1. *“An applied science which seeks, by the systematic observation and analysis of disaster, to improve measures relating to prevention mitigation, preparedness, emergency response and recovery” (Nick Carter, 1991);*
2. *“A process that assists communities to respond, both pre- and post-disaster, in such a way as to save lives, to preserve property; and to maintain the ecological, economic, and political stability of the impacted region” (Pearce, 2000);*
3. Penanggulangan Bencana (Disaster/Emergency Management) adalah “proses yang terus menerus dimana setiap individu, kelompok dan masyarakat berusaha mengatur risiko untuk menghindari atau memperbaiki dampak dari suatu

bencana yang dihasilkan dari suatu musibah” (Wikipedia, *Emergency Management*, 2007);

4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah ”serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi” (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 5).

Pendekatan holistik merupakan pendekatan baru yang dikembangkan dari pendekatan sebelumnya yaitu pandangan bencana konvensional, pandangan progresif, pandangan ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan pandangan ilmu terapan, dengan mengkombinasikan pendekatan alternatif dan dominan. Pandangan holistik menekankan pada ancaman (Threat) dan kerentanan (Vulnerability) serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, gejala alam menjadi bencana jika mengancam hidup dan harta benda, ancaman akan berubah menjadi bencana jika bertemu dengan kerentanan (Basarnas, dan Pujiono, 2007). Pendekatan ini sangat berharga karena mengakui pentingnya kekuatan alam dan buatan manusia dalam mempengaruhi kerentanan. Menurut Mc Entire (2001) berpendapat bahwa pendekatan dominan perlu memperluas penjelasannya bahwa bencana melampaui sebab-sebab alamiah, sedangkan pada pendekatan alternatif harus memperluas titik pandang di luar alam sosial, ekonomi dan politik. Bahkan Hewitt (1983) menegaskan: “ akan salah untuk mengatakan bahwa terjadinya banjir atau gempa sama sekali tidak mencerminkan sifat proses geofisika”. Bahkan Pelling dan Uitto (2001) juga menyerukan pendekatan holistik untuk manajemen bencana dan percaya bahwa teori bencana harus memperluas

fokus agar memahami pengaruh struktur politik dan ekonomi yang lebih luas dan pola pada kerentanan bencana. (dikutip oleh Chazienul Ulum,2014).

Sampai saat ini para pakar manajemen masih memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang definisi manajemen. Mary Paker Folet (dalam Hadi Handoko, 1984) mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk berbagai tugas yang mungkin diperlukan. Dalam pengertian manajemen sebagai seni tersebut mengandung arti bahwa kemampuan manajer adalah kemampuan atau ketrampilan pribadi (bakat). Selanjutnya Luther Gulick (dalam Hadi Handoko, 1984) mendefinisikan manajemen sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama tersebut lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Hadi Handoko lebih lanjut mendefinisikan manajemen sebagai kombinasi ilmu (science) dan seni secara proporsional. Dalam pembuatan keputusan seorang manajer mempergunakan pendekatan ilmiah, sedangkan dalam aspek perencanaan, kepemimpinan, komunikasi dan segala sesuatu yang menyangkut unsur manusia perlu menggunakan pendekatan artistik atau seni. Definisi manajemen yang lebih kompleks dan mencakup berbagai aspek penting dikemukakan oleh Stoner, yakni manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota

organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Stone James, 1982).

Disaster management is " An applied science which seeks, by the systematic observation and analysis of disaster, to improve measures relating to prevention, nitigation, preparedness, emergency response and recovery. " (Carter, 1991). Menurut William Nick Carter (1991) bahwa penanggulangan bencana alam (disaster management) perlu diselenggarakan melalui tahapan-tahapan : persiapan (*preparation*), penghadangan/penanganan (*facing disaster*), perbaikan akibat kerusakan (*reconstruction*), pemfungsian kembali prasarana dan sarana sosial yang rusak (*rehabilitation*), dan penjinakan gerak alam yang menimbulkan bencana (*mitigation*) (Warto, 2003). Tahapan-tahapan ini tidak mutlak, karena bisa yang satu mendahului yang lain. Dengan kata lain manajemen bencana adalah sebuah ilmu pengetahuan terapan yang berupaya meningkatkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan dengan menggunakan pengamatan dan analisa yang sistematis atas bencana. Pada dasarnya manajemen bencana merupakan sebuah proses yang dinamis, proses tersebut terdiri dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

2.5 Manajemen Pergudangan

Ambert (2001), di dalam bukunya menjelaskan pengertian manajemen pergudangan sebagai bagian dari sistem logistik perusahaan. Manajemen pergudangan berfungsi untuk menyimpan beberapa produk yang berada di titik sumber dan titik konsumsi serta informasi mengenai status, kondisi hingga disposisi barang. Sederhananya, manajemen pergudangan diartikan sebagai bagian manajemen perusahaan yang berfungsi untuk mengontrol, mendata, mengendalikan serta mengelola tempat penyimpanan barang sementara. Barang-barang yang disimpan di dalam gudang bersifat sementara, guna untuk menjaga keaslian maupun kualitasnya. Pergudangan yang terstruktur dan terencana dihipunk dalam manajemen pergudangan (warehouse management). Struktur dan rencana tersebut meliputi kebutuhan perusahaan untuk menentukan jadwal produksi dengan tingkat persediaan yang terbatas. Selain itu, berguna juga untuk menyarankan kebijakan pengisian bahan baku dalam memenuhi pesanan produksi atau permintaan produk. Gudang dan pergudangan sangat penting bagi perusahaan karena menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Sistem manajemen pergudangan akan menjamin kualitas produk sehingga nilai produk tetap terjaga dan secara langsung memberikan keuntungan bagi pendapatan perusahaan.

Selain terstruktur dan terencana, pergudangan yang baik harus memiliki sistem pelayanan yang baik meliputi adanya jaminan keamanan, kemudahan akses informasi keluar, informasi masuk, dan penyimpanan barang. Selain itu, sistem pergudangan harus memiliki kesesuaian dengan kondisi lingkungan fisik bagi

barang yang disimpan. Definisi Supply Chain Management yang selanjutnya disebut SCM menurut Simchi-Levi et al. (2002) merupakan serangkaian pendekatan yang diterapkan untuk mengintegrasikan supplier, pengusaha, gudang (warehouse) dan tempat penyimpanan lainnya secara efisien sehingga produk dihasilkan dan didistribusikan dengan kuantitas yang tepat, lokasi tepat dan waktu yang tepat untuk memperkecil biaya dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Martin (2011) mengartikan manajemen logistik sebagai proses yang secara strategik mengatur pengadaan bahan (procurement), perpindahan dan penyimpanan bahan, komponen dan penyimpanan barang jadi (dan informasi terkait) melalui organisasi dan jaringan pemasarannya dengan cara tertentu sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan baik untuk jangka waktu sekarang maupun waktu mendatang melalui pemenuhan pesanan dengan biaya yang efektif. Sedangkan menurut Warman (2010:5) gudang (kata benda) adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang dagangan. Sementara penggudangan (kata kerja) ialah kegiatan menyimpan dalam gudang. Menurut Widiyanto dan Tenaka dalam Panduan & Direktori Logistik Indonesia (2011:82) banyak organisasi supply chain memanfaatkan gudang sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan yang terkait proses seperti receiving, put away, storing, picking and delivering.

Beberapa hal penting dalam manajemen pergudangan (Kirim 2016):

1. Pemeriksaan keluar masuk barang

Keluar masuknya barang harus diperiksa terlebih dahulu oleh bagian gudang, mengapa harus demikian? Pemeriksaan ini untuk menghindari adanya retur

pembelian dan juga retur penjualan Pemeriksaan juga difungsikan untuk menguji kelayakan barang yang akan masuk digudang.

2. Administrasi barang

Manajemen pergudangan juga meliputi administrasi yang melibatkan keluar masuknya barang dan juga retur barang. Sangat penting jika administrasi ini dilakukan dengan tepat karena jika administrasi tidak teratur maka proses produksi juga akan berpengaruh. Administrasi ini meliputi penerimaan barang, penyimpanan barang dan pengembalian barang.

3. Inventory aktiva lancar

Barang yang ada digudang merupakan aktiva lancar yang bisa dilakukan untuk menambah modal. Inventory ini dilakukan melalui manajemen pergudangan yang bisa dilaporkan setiap bulan dalam neraca perusahaan.

4. Stock opname

Stock opname diperlukan setiap akhir bulan sebagai bagian dari control barang digudang dan mengetahui selisih tidaknya barang tersebut.

5. Tindak lanjut sistem pergudangan yang adil

Jika dirasa perlu manajemen pergudangan ini difungsikan untuk menilai baik buruknya pengelolaan gudang yang ada. Jika diasas merugikan perusahaan maka manajemen gudang bisa dirubah menjadi lebih baik lagi dengan metode yang berbeda.

2.6 Warehouse Management System (WMS)

Manajemen gudang dirancang dengan tujuan mengendalikan pergudangan. Jalan keluar dari kontrol ini adalah pengurangan biaya di gudang serta menjadi efisien dan efektif dalam menyimpan barang di gudang. Sistem informasi manajemen sering di sebut sistem manajemen gudang (*warehouse management system*). *Warehouse management system* (WMS) adalah kunci dalam rantai pasokan, karena tujuan utamanya adalah mengendalikan semua proses yang terjadi di dalamnya seperti pengiriman, penerimaan, pembongkarang, pengangkutan. Tujuan *warehouse management system* (WMS) adalah untuk mengelola fasilitas terkomputerisasi untuk menerima, mengangkut, menyimpan barang, dan mengembangkan mode terkomputersisasi untuk pengumpulan, pengemasan, dan pengangkutan barang. Keuntungan dalam *warehouse management system* (WMS) adalah aplikasi WMS di suatu pergudangan. Itu dapat mempercepat suatu proses, yaitu dengan memiliki proses yang dilakukan dengan komputerisasi atau secara otomatis yang sebelumnya dilakukan secara manual dan dilakukan dengan banyak orang. Dengan *warehouse management system* (WMS) kami mengetahui transaksi inventaris dan jumlah stok lebih cepat dan akurat setiap saat (waktu nyata). Dengan *warehose management system* (WMS) kami dapat mengelola lokasi penyimpanan secara optimal. Jumlah dan jenis barang yang akan memasuki gudang akan dapat disimpan dengan alat dalam sistem (Pane, et al 2020:93).

Kelebihan dan Kekurangan *Warehouse Management System* (WMS)

1) Kelebihan

Kelebihan warehouse management system (WMS) ini dapat mempercepat waktu pelaksanaan proses, proses yang dilakukan oleh computer atau secara otomatis, yang sebelumnya diminta dilakukan secara manual dan dilakukan oleh beberapa orang. Dengan warehouse management system (WMS) kami dapat secara optimal mengelola lokasi penyimpanan barang. Jumlah dan jenis barang yang memasuki gudang dapat disimpan dengan alat sistem. Alur distribusi barang dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip FIFO (first in first out).

- a) Setiap barcode jika dipindahi beberapa kali maka hanya 1 yang disimpan.
- b) Akurasi stok jauh lebih baik daripada WMS non-serial.
- c) Debit langsung FIFO dapat dengan mudah diterapkan.
- d) Persediaan dapat dilakukan dengan mudah.

2) Kekurangan

Kekurangan atau kelemahan warehouse management system (WMS) adalah ketepatan pergerakan barang dan perhitungan durasi barang yang disimpan. Maka dalam aplikasinya ia harus mengendalikan pergerakan barang dan dokumen untuk meningkatkan efisiensi para pengguna gudang, sehingga jumlah dan lamanya barang disimpan dalam nilai minimum atau sesuai dengan rencana.

- a) Setiap barcode dapat dipindai beberapa kali.
- b) Ketetapan stok lemah.
- c) Pemilihan FIFO sulit.
- d) Evaluasi sulit untuk dilaksanakan.

2.7 Stock Take

Stock take adalah kegiatan mendata fisik barang dengan cara mencocokkan dengan stok pada sistem. Transaksi ini biasanya melibatkan lokasi, rak, lot, gudang, serta barang dan jumlahnya. Informasi yang diperoleh dari kegiatan stock take dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada barang yang hilang atau tidak tercatat pada sistem selama proses transaksi pada periode tersebut. Sehingga dapat diambil tindakan terkait dengan temuan yang terjadi. Proses stock take dilakukan sebagai mekanisme dan kontrol terhadap arus masuk (in) dan keluar (out) barang, dimana proses ini akan dilakukan penghitungan stok secara fisik untuk dicocokkan dengan stok yang tercatat didalam sistem (Yulia, 2014:212). 24 Kegiatan stock take dilakukan untuk mengetahui secara pasti dan benar tentang persediaan barang yang ada pada catatan pembukuan dan barang yang ada di gudang, apakah jumlahnya sama atau berbeda. Jika ditemukan barang lebih banyak daripada yang tertulis di daftar stok, maka bisa dilakukan pengecekan ulang apakah kemungkinan ada transaksi yang belum dicatat atau kesalahan dalam melakukan pencatatan. Jika terjadi kekurangan, biasanya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan membuat jurnal penyesuaian atas kekurangan barang atau bisa juga perusahaan membebankan kepada petugas bagian stok barang melakukan penggantian atas kekurangan barang. Stock take dilakukan tergantung dari kebijakan perusahaan yang sudah disetujui. Masing-masing perusahaan memiliki kebijakan tersendiri terkait periode kegiatan stock take. Berbeda jenis usaha juga pasti berbeda pula kebijakan untuk menentukan kapan sebaiknya dilakukan perhitungan stok barang ini. Umumnya periode untuk

melakukan perhitungan stok dilakukan dalam periode tahunan, per kuartal (4 bulan), triwulan (3 bulan), bahkan ada yang setiap bulan sekali. Tetapi kebanyakan perusahaan melakukan perhitungan dan pengecekan stok adalah per kuartal atau triwulan, karena memang proses ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, para petugas juga harus memeriksa secara detail semua barang dan beserta kondisinya. Namun, dengan adanya teknologi barcode perusahaan sudah sedikit memudahkan dalam proses stock take. Untuk menekan risiko selisih dari stok, pada beberapa perusahaan melakukan kegiatan opname stok barang di setiap awal bulan. Tujuannya adalah agar perbedaan stok dapat segera diketahui dan dicari tahu akar dari analisis perhitungannya. Jika penyebabnya adalah jumlah barang, maka jarak waktu ketika melakukan opname stok barang juga semakin lama. Kegiatan ini dapat dilakukan di sela hari kerja atau ketika perusahaan sedang tidak beroperasi. Adapun tujuan dari stock take :

- 1) Memastikan data stock actual barang atau kargo dilokasi (rak atau gudang) sesuai dengan data stock inventory system setiap harinya.
- 2) Membantu memastikan seluruh aktifitas receiving dan delivery berjalan dengan benar tepat dan lancar sesuai dengan prosedur kerja yang dibuat.
- 3) Mengetahui arus barang atau kargo yang keluar atau masuk setiap harinya.
- 4) Mengetahui kondisi persediaan stock barang secara riil.
- 5) Stock take memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut:
- 6) Meminimalisir penyimpangan terhadap barang, baik itu kekurangan atau kelebihan.

- 7) Bisa untuk tidak lanjut secara cepat jika ada barang hilang atau kekurangan barang, sehingga tidak sampai terjadi stok barang menjadi kosong.
- 8) Dapat digunakan sebagai analisis tahun-tahun sebelumnya sehingga perkembangan perusahaan bisa diketahui.
- 9) Mengetahui secara pasti arus masuk dan keluar barang secara pasti
- 10) Mengetahui kondisi barang di gudang secara pasti.

Persiapan *Stock Take*

1. Menentukan tanggal pelaksanaan *stock take*

Stock take harus dilakukan pada saat tingkat operasional di warehouse sangat rendah. Semakin sedikit barang yang akan dilakukan *stock take* maka akan semakin akurat hasil *stock take*. Secara umum tanggal yang terbaik untuk melakukan *stock take* adalah pada minggu 1 atau maksimal minggu ke 2 dimana kondisi barang secara umum sedang dalam berada dititik terendah. Dikarenakan *stock take* kadang memerlukan waktu lebih dari 1 hari dan harus dilakukan tanpa terganggu adanya operasional, maka sebaiknya *stock take* dicarikan hari-hari libur seperti sabtu – minggu.

2. Menyiapkan team

Team pelaksana *stock take* harus disiapkan dengan cermat karena ditangan merekalah akurasi dan kecepatan *stock take* dipertaruhkan. Team yang harus ada didalam pelaksanaan *stock take*:

- a. Leader
- b. Help desk
- c. Counter 1,2,3

- d. Data Entry
- e. Cross Check
- f. Counting
- g. Output data entry
- h. General
- i. System
- j. Non System
- k. Konsumsi

3. Menata barang dan lokasi *stock take*

Salah satu tugas dari team general adalah merapihkan barang dan lokasi stock take. Perapihan perlu dilakukan agar pada saat dilakukan penghitungan nanti tidak terjadi kesalahan isi karton atau kesalahan lokasi barang misalnya, perlu diberikan tanda (*signage*) terhadap lokasi atau barang-barang yang tidak dihitung atau yang masih bermasalah dan belum diproses kedalam sistem. Kebersihan lokasi dan kerapihan barang-barang yang ditata di rak atau di pallet akan memberikan kecepatan dan keakuratan yang tinggi.

4. Menata dokumen pendukung operasional.

Sama dengan penataan yang dilakukan terhadap barang, dokumen pendukung operasional pun perlu ditata dengan baik. Dokumen konsinyasi misalnya, adalah dokumen yang paling penting yang perlu disiapkan karena secara fisik barang tersebut tidak ada tetapi masih tercatat didalam sistem. Terhadap hal ini, perlu dilakukan stock take antara data yang tercatat didalam sistem dengan data yang tersedia didalam fisik dokumen pendukung konsinyasi

tersebut. Jika tidak terdapat dokumen konsinyasi yang sesuai dengan data sistem, sudah pasti akan terjadi miss stock – stock hilang.

5. Training dan pelaksanaan *stock take*

Training harus dilakukan setiap saat pelaksanaan stock take akan dimulai. Seperti halnya yang dilakukan oleh pramugari didalam pesawat pada saat akan *take off*, maka leader stock take harus melakukan training singkat kepada seluruh team pelaksanaan *stock take*.

2.8 Aplikasi Akuntansi Accurate

Software Paket Pertama kali dibuatnya accurate menitik beratkan pada pembuatan software paket. Dikarenakan software paket memiliki keunggulan yaitu harga bisa relatif murah dikarenakan banyak penggunanya yang rata-rata hanya pengusaha kecil hingga menengah saja. Dan jika dibandingkan dengan perusahaan besar perusahaan seperti itu pasti tidak akan sanggup untuk membayar biaya mulai dari pembuatan hingga pengimplementasian aplikasi yang diinginkan. Oleh sebab itu accurate mencoba untuk memberikan alternatif untuk perusahaan kecil dan menengah. Dikarenakan hal tersebut accurate mencoba untuk memberikan solusi untuk para pengusaha kecil dan menengah untuk mempunyai sistem tersendiri diperusahaanya.

Ada beberapa modul yang disiapkan oleh accurate yang dikemas dala satu paket yaitu: a) Sales/Account Receivable meliputi Order, Delivery Order, Sales Invoice, Sales Return, Customer Receipts b) Purchase/Account Payable meliputi Order, Receive Item, Purchase Invoice, Purchase Return, Vendor

Payment. c) Item & Inventory meliputi Warehouse, Inventory Adjustment, Item Price Adjustment, Grouping, Item Transfer, dan Job Costing. d) General Ledger meliputi Company Information, Company Preference, Journal Voucher, General Ledger. e) Cash & Bank, meliputi Other Deposit, Other Payments, Bank Transfer, Reconcile, Bank Book. f) Fixed Asset meliputi Fiscal Fixed Asset Type, Fixed Assets Types, Fixed Asset List. g) Manufacturing (untuk ACCURATE 3 Edisi Enterprise) meliputi Item Standard Cost, Standard Conversion Cost, Bill Of Material, Work Order, Work Order Execution, Material Release, Material Adjustment, Product And Material Result, Cancel Production.

Keunggulan Accurate Hampir semua software komputer akuntansi mempunyai karakteristik dan prosedur yang sama, karena yang dibuat berdasarkan hal yang sama yaitu kegiatan dan transaksi perusahaan menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Berikut ini adalah kelebihan dari Accurate Accounting Software sebagai software akuntansi dibandingkan dengan software akuntansi lainnya, sebagai berikut: a) Client Server Technology b) Multi User dengan tiga tingkat kewenangan yaitu Create, Edit dan Report c) Multi Currency dengan menghitung otomatis realize & unrealized gain/loss d) Multi Unit dengan tiga tingkat perhitungan unit setiap barang e) Multi Warehouse (Banyak Gudang) f) Multi Discount (Discount Item, Discount Invoice, dan Discount Payments) g) Project & Department (versi Deluxe Edition dan Enterprise Edition) h) Real Time Processing dengan Backward & Forward Transaction i) Fungsi pilihan tampilan menu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris j) Perubahan Desain template setiap voucher dan invoice k) Report yang dapat dicustomize (designer) sendiri

oleh user jika memahami proses report dengan Fast Report l) Digit transaksi sampai dengan 15 digit dan dua decimal 920 trilliun (920.000.000.000.000,00). m) Keakuratan perhitungan kuantitas barang sampai dengan 4 desimal. n) Bisa custom financial statement dengan berbagai macam pengelompokan untuk tipe Balance Sheet dan Income Statement. o) Fasilitas Grouping di dalam item yaitu mengelompokkan beberapa barang dalam satu kelompok barang baru dengan tanpa proses penggabungan. p) Fasilitas Job Costing yaitu mengelompokkan barang dalam satu kelompok barang baru dengan proses penggabungan dan dengan nilai cost yang baru. q) Fitur Extract Import yang memungkinkan Anda mengekstrak transaksi penjualan dari perusahaan cabang untuk dikirimkan ke perusahaan pusat (Renobajag, 2015).

Perbedaan Software Akuntansi ACCURATE dengan Software Akuntansi lainnya. Kini memang banyak software atau perangkat lunak yang ditawarkan untuk mengatasi sistem akuntansi di perusahaan. Sebut saja program made in bule alias impor seperti DacEasy Accounting (DAC), Quickbook, MYOB, Peachtree, Value plus dan Oracle, yang beken di luar negeri dan cukup populer juga di dalam negeri. Sementara untuk local content, misalnya, ada Dbs 28 Solution, Accurate, Zahir Accounting, ACCS, MAS Accounting, dan masih banyak lagi. Namun masalahnya, apakah program-program itu, baik lokal maupun impor, cukup sederhana dan aplikatif untuk bisnis di Indonesia hal itu juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Accurate Accounting Dari segi spesifikasi teknis, ACCURATE tidak membutuhkan hardware komputer/notebook yang mahal-mahal amat. hampir

semua komputer dengan OS Windows XP (dan lebih baru), bisa menjalankan aplikasi office (Word, Excel) dengan baik, bisa dipakai untuk ACCURATE dengan baik pula. Dengan pengembangan secara kontinue selama lebih dari 10 tahun ditambah masukan lebih dari 50 ribuan pengguna ,bisa dipastikan ACCURATE memiliki fitur yang paling lengkap dibandingkan dengan produk sejenis yang ada di pasar. Beberapa kompetitor ACCURATE menjual tambahan fitur secara terpisah sehingga dibutuhkan biaya yang lebih mahal ketika memerlukan fitur yang lebih lengkap. ACCURATE dijual secara paket dengan fitur yang sudah lengkap namun dengan harga terjangkau untuk perusahaan dagang, jasa, maupun jenis perusahaan manufaktur. Sebagai software akuntansi yang paling banyak di pakai dikalangan UKM dan perguruan tinggi, ACCURATE memiliki kestabilan yang tidak bisa dikompromikan, sesuai dengan standar akuntansi, dan cocok dengan sebagian besar usaha di Indonesia dibandingkan dengan produk sejenis buatan luar negeri, ACCURATE unggul dalam hal local content seperti faktur pajak, tersedianya laporan pajak (SPT PPn dan PPh) yang terintegrasi, 29 perlakuan khusus dalam multi currency seperti kurs pajak yang berbeda dengan kurs transaksi, jumlah digit transaksi hingga 15 digit dsb. Walaupun memiliki fitur yang pasti jauh lebih lengkap dibandingkan produk sejenis lain, ACCURATE dirancang sangat mudah dalam pemakaiannya. Belajar menggunakan beberapa fungsi tertentu dari ACCURATE hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 30 menit. Dalam hal layanan purna jual, pengguna ACCURATE cukup dimanjakan dengan pilihan bantuan teknis yang beragam, *knowledgebase* yang bisa diakses secara online 24 jam, buku-buku panduan yang

dijual secara luas, hingga konsultasi dengan customer support CPSSoft lewat yahoo Messenger, email, telepon maupun fax setiap hari jam kerja. Namun dengan semua kelengkapan dan kelebihan yang dimilikinya, ACCURATE justru paling ekonomis dalam penggunaannya. berbeda dengan beberapa kompetitor, ACCURATE mengenakan biaya license tambahan yang sangat kompetitif serta tidak mengenakan biaya perawatan sama sekali. Accurate adalah software akuntansi yang user friendly, job costing software yang memudahkan anda dalam menyusun laporan keuangan, laporan laba/rugi dan masih banyak lagi. Laporan Accurate sendiri telah mengcover lebih dari 250 jenis laporan keuangan, mulai dari: 1. job costing software Inventory 2. Penjualan 3. Pembelian 4. job costing software Kas/Bank 5. Dan Aktiva 1. Modul-Modul Accurate sendiri terdiri atas :

- a) Buku Besar
- b) Kas & Bank
- c) job costing software
- d) Persediaan Barang
- e) Penjualan
- f) Pembelian
- g) Aktiva Tetap

2. Accurate Software terdiri ada 3 jenis software :

- a) job costing software Accurate Standard Edition
- b) Accurate Deluxe Edition
- c) Accurate Enterprise (untuk publikasi)

Keistimewaan ACCURATE antara lain job costing software handal Menggunakan database server Firebird, database berbasis SQL dari kelas client/server, ACCURATE mampu melayani sampai ratusan user sekaligus tanpa penurunan performance yang berarti. Job costing software Selain itu database-nya sangat kuat sehingga tidak akan rusak sekalipun listrik untuk server matimendadak. SECURE / Aman menggunakan metode pengamanan yang berlapis dan ter-enkripsi, job costing software database ACCURATE hanya bisa diakses oleh personel yang diberi hak sesuai dengan batasan yang diperbolehkan. Selain itu folder tempat file data ACCURATE tidak

perlu di-share sehingga tidak mungkin data ACCURATE di-copy oleh yang tidak berhak.

Keunggulan-keunggulan ACCURATE: 1. Kemudahan dalam menggunakan aplikasi (user Friendly) 2. Support yang selalu siap membantu anda dalam penerapan transaksi yang sesungguhnya. job costing software 3. Biaya yang terjangkau tanpa perlu adanya tambahan biaya maintenance baik bulanan ataupun tahunan. 4. Client server technology dengan kemampuan rollback, job costing software 5. Transaksi real time, tidak perlu proses posting. 6. Modul lengkap untuk perusahaan dagang/ jasa/ kontrak torjob costing software. 7. Bilingual software (Inggris dan Indonesia). 8. Mencatat hingga 920 triliun. job costing software. 9. Laporan dapat di view langsung dengan microsoft excel. 10. Fasilitas untuk Proses Export & Import data.job costing software 11. Laporan, faktur yang dapat di customize oleh user. 12. Jejak audit.job costing software 13. Multi user. 14. Multi level GL Account dan item job costing software 32 15. Multi Company. 16. Multi Gudang.job costing software. 17. Multi Pajak Penjualan. 18. Multi Currency dengan kurs komersil dan kurs pajak.job costing software 19. Multi level Discount. 20. Multi unit dengan 3 level unit.job costing software 21. Metode persediaan dengan FIFO dan Average. 22. Tax Report dari PPN IN dan OUT sampai SPT Tahunan Form 1771 secara Otomatis.job costing software. ACCURATE merupakan software akunting yang kaya dengan fitur yang dirancang khusus untuk perusahaan kecil hingga menengah. Sampai dengasn saat ini, telah ada ratusan perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah memakai Accurate. Bahkan ada beberapa pengusaha Indonesia yang

membawa Accurate untuk dipergunakan di perusahaannya yang berada di luar Indonesia. Laporan yang dapat dihasilkan Accurate: 1. Saldo piutang/hutang per tanggal yang diinginkan. 2. Laporan untuk keperluan Auditing, seperti Layout untuk Top Schedule/Working Trial Balance (kertas kerja auditor), Audit Trails (jejak audit), Daftar Rasio Keuangan, dan Projected Cash Flow 3. Untuk Aktiva Tetap, Accurate menyediakan laporan Daftar Penyusutan dan Perhitungan Beda Sementara, laporan ini disediakan untuk menunjang SPT Pajak. 4. Laporan Keuangan, yaitu Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas, dan juga Laporan Buku Besar. 5. Untuk persediaan, ada Kartu Persediaan, Laporan Inventory Valuation, dan Projected Inventory. 6. Laporan Pembelian, a.l: Laporan Pembelian Barang per Vendor, Purchase Order per Vendor, Laporan Pembelian dibandingkan dengan 4 hari sebelumnya, 4 bulan sebelumnya, dan juga 4 tahun sebelumnya, dan Laporan Retur Pembelian. 7. Laporan Penjualan, a.l: Laporan Komisi Salesman, Sales Order per Item, termasuk juga Laporan retur penjualan dan analisa laporan keuangan, baik Analisa Neraca, maupun Rugi Laba 8. Laporan Dupont System dan Z-Score. 9. Dan juga Laporan Pendukung SPT seperti: Daftar Penyusutan Aktiva Tetap, Daftar PPN Masukan, Daftar PPN Keluaran, Rekonsiliasi PPN lebih/kurang Bayar, Daftar Kurs Dirjen Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam bukunya *Education Research* penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana penelitian sangat tergantung terhadap informasi dari objek/partisipan : ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum pengumpulan data yang sebgaaian besar terdiri atas kata-kata/teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subyektif (Creswell, 2008: 46).

3.2 Fokus Penelitian

Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah fenomenologi. Fenomenologi dipilih karena didalamnya peneliti mengidentifikasi tentang suatu fenomena tertentu, serta mengharuskan peneliti mengkaji subjek dengan terlibat langsung untuk mengembangkan pola dan relasi yang bermakna (Creswell, 2010). Fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur, menganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat dan atau pendukung tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan tersebut, dan mencari tau rekomendasi kebijakan tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur.

3.3 Informan Penelitian

Narasumber merupakan informasi kunci atau orang – orang yang berpotensi memberikan informasi yang diperlukan. Informasi ini harus banyak pengalaman tentang penelitian., serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai – nilai, sikap, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Narasumber yang dipilih untuk mendapatkan informasi tersebut yaitu :

- 1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2) Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik
- 3) Kasi Logistik

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPBD yang terletak di Jl. Letjend. S. Parman No.55, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256

3.5 Jenis dan Sumber Data

- 1) Data primer adalah data mengenai informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan konsep penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer kemudian diolah kembali oleh peneliti.
- 2) Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, seperti artikel, jurnal, peraturan pemerintah,

undang-undang. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah kembali. Dalam penelitian ini data sekunder yang di dapatkan yaitu jurnal tentang tata Kelola pergudangan, logistik dan peralatan seta undang-undang BNPB.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data kualitatif (Cresswell, 2009) meliputi : Pengamatan, Wawancara, pengumpulan Dokumen Serta Bahan Audio Visual . Dalam pengumpulan data pada penelitian disini peneliti mengkombinasikan dengan keseluruhan teknik pengumpulan data menurut Cresswell tersebut, yakni : melakukan pengamatan, melakukan wawancara, mendokumentasikan opini dari para informan serta menyimpan audio maupun rekaman yang akan saya cari meaning atau makna dari para opini informan tersebut. Kemudian menemukan kesimpulan atau makna atas isu yang dimaksud tersebut.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik. Metode interview adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (narasumber) dilakukan secara

berhadapan-hadapan(*face to face*). Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan data tentang tata kelola gudang logistik dan peralatan BPBD. Wawancara yang dilakukan peneliti dilakukan dengan 3 narasumber, dengan data informan sebagai berikut :

1. Pak Bige Kepala Seksi Logistik BPBD Provinsi Jatim dilaksanakan wawancara tanggal 21 Desember 2021.
2. Pak Ainul Akmal, staff Bidang Kedaruratan dan Logistik dilaksanaka wawancara tanggal 21 Desember 2021.
3. Pak Agung, Staff Logistik BPBP Provinsi Jatim dilaksanakan wawancara 17 Januari 2022.

b. Pengamatan / Observasi

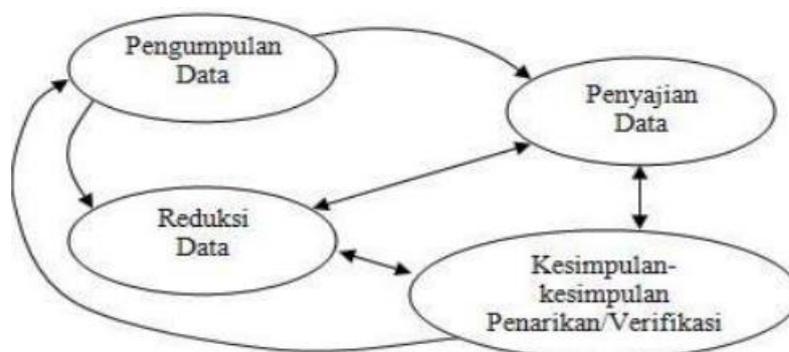
Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Dibandingkan metode survey metode observasi lebih obyektif. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi mengobservasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran peraba dan pengecap. Dalam penelitian ini diteliti secara langsung penerapan konsep pengelolaan pergudangan dan logistik BPBD Jawa Timur.

c. Dokumentasi

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2017:247) yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Interaktif menurut Miles dan Huberman

Sumber : Internet

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian Data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2017:149) Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang diperoleh dari wawancara yang mendalam dikumpulkan untuk kemudian diambil kesimpulan sehingga bias disajikan dalam bentuk teks deksriptif.

3. Menarik Kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan atau yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatancatatan dilapangan sehingga data-data di uji validitasnya. Hasil wawancara dari informan kemudian ditarik kesimpula sesuai dengan masalah dan tujuan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berada di Jalan Letjend S. Parman No. 55, Krajan Kulon, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256.

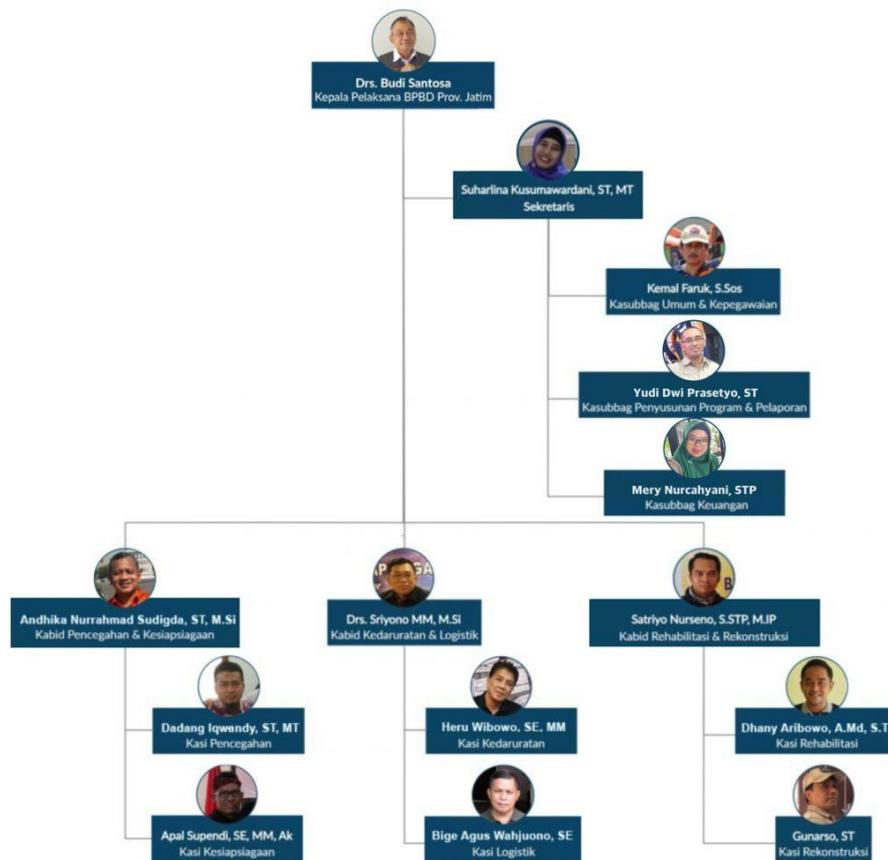
4.1.1 Profil BPBD

Nama : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Alamat : Jalan Letjend S. Parman No. 55, Krajan Kulon, Waru,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256.
Nama Kepala BPBD : Drs. Budi Santosa
Website : <https://bpbd.Jawa Timurprov.go.id>
Email : mail@bpbd.Jawa Timurprov.go.id
Telp : (031) 8550222

4.1.2 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong” sedangkan untuk misi Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur “ Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya”.

4.1.3 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jawa Timur

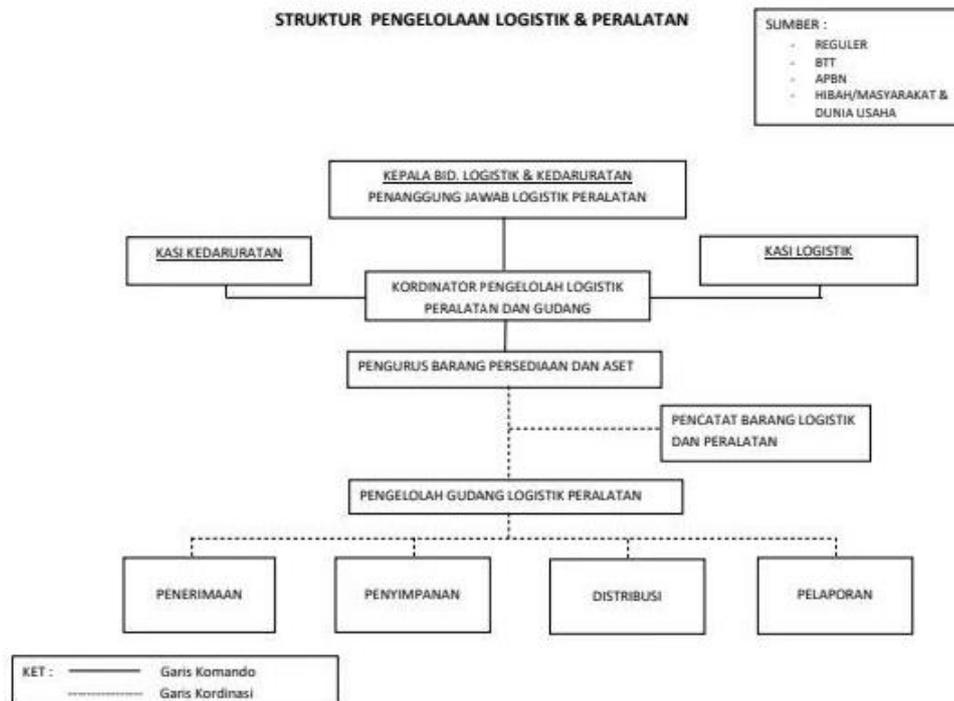


Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jawa Timur 2021

Sumber : BPBD Jawa Timur

BPBD Provinsi Jawa Timur dikepalai oleh Kepala Pelaksana yang mana Kepala Pelaksana membawahi beberapa bagian seperti Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Penyusunan Program dan Pelaporan, Kasubbag Keuangan, Kabbid Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi Kasi Pencegahan, Kasi Kesiapsiagaan, Kabbid Kedaruratan dan Logistik membawahi Kasi Kedaruratan Kasi Logistik, Kabbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Kasi Rehabilitasi Kasi Rekonstruksi.

4.1.4 Struktur Pengelolaan Logistik & Peralatan



Gambar 4.3 Struktur pengelolaan logistik dan peralatan

Sumber : dokumen BPBD Provinsi Jawa Timur 2019

4.2 Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan analisis hasil penelitian yang didapat dari lapangan dengan cara teknik – teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan diatas yang kemudian dianalisis dengan acuan teori yang digunakan. Pembahasan ini berisi tentang kebijakan tata kelola pergudangan dan logistik kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur, apakah ada faktor penghambat dan pendukung tata kelola pergudangan dan logistik kebencanaan, apa yang menjadi rekomendasi kebijakan tata kelola pergudangan dan logistik kebencanaan.

Dalam menganalisis kebijakan tata kelola pergudangan dan logistik kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur, peneliti memfokuskan penelitian yang menjadi hambatan yaitu, Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Tempat (Lokasi). Peneliti juga fokus pada meneliti analisis kebijakan, dengan mencari tahu apa saja yang menjadi hambatan dan pendukung. Yang mana, dari kedua fokus tersebut kemudian peneliti hendak menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi factual lapangan serta teori – teori analisis kebijakan.

Pada penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara dengan pihak BPBD Provinsi Jawa Timur yang kemudian hasil wawancara tersebut diolah dengan cara menyajikan data catatan yang terlampir dan melakukan koordinasi data yang kemudian hasilnya disajikan pada poin – poin berikut ini :

4.2.1 Analisis Kebijakan tata kelola pergudangan sesuai perka BNPB Pasal 7 tahun 2008

Berkaitan dengan Analisis kebijakan tata kelola, pokok utama analisis tata kelola diantaranya ialah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Logistik adalah barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan turunannya dalam rangka penanggulangan bencana, Peralatan adalah segala bentuk alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan, pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar untuk pemulihan segera sarana prasarana

vital, Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan logistik dan peralatan meliputi perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian, dan penghapusan guna mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Melalui kebijakan yang tercantum pada BNPB No 7 tahun 2008 tentang sistem manajemen logistik dan peralatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Bige Kepala Seksi Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur dan Bapak Agung, Staff Kasi Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur yang menyatakan :

“terkait dengan kebutuhan dasar saat terjadi bencana, permohonan dari kabupaten/Kota. Yang pertama terkait inisiatif dari pihak BPBD bantuan bersifat dasar. Kedua permohonan dari kabupaten kota melakukan asesmen dengan cara membagi para korban”.

Hasil wawancara diatas dilakukan dengan Bapak Bige, pada tanggal 21 Desember 2021.

“Kebijakan tata kelola pengadaan logistik dan peralatan berdasarkan dengan pemenuhan dasar kebutuhan sesuai pedoman kepala BNPB No. 7 tahun 2008, yaitu : Penampung sementara, Bantuan pangan, Sandang, Air Bersih, Pelayanan Kesehatan. Sedangkan dengan prinsip : cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabilitas, kemitraan, pemerdayaan, Non diskriminasi, dan Non proletasi.”

Hasil wawancara diatas dilakukan dengan Bapak Agung, pada tanggal 17 Januari 2022.

4.2.2 Analisis Kebijakan tata kelola pergudangan, logistik dan peralatan BPBD Jawa Timur

Perencanaan kebutuhan logistik dan tata kelola pergudangan BPBD Jawa Timur, telah terbentuk tim perencanaan yang dibawah langsung oleh kepala seksi logistik untuk melakukan inventarisasi logistik. Selain itu, BPBD Jawa Timur juga telah memiliki rencana operasional untuk tahun depan yang disesuaikan

dengan pemakaian logistik tahun-tahun sebelumnya. Pemakaian logistik per tahun ini dapat diketahui dengan melihat berita acara serah terima logistik sebelumnya ataupun dengan melihat kondisi geografis tiap daerah. Berikut merupakan data Rekap Stock Opname Sembako Persediaan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur bulan Desember 2021.

Tabel 4.2 Data Rekap Stock Opname Sembako Persediaan Penanganan Covid-19
Provinsi Jawa Timur

| NO | NAMA BARANG | SO 31 DESEMBER 2021 | TOTAL | SATUAN | KETERANGAN |
|----|-------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------|
| 1 | SARDEN | 6,204 | 6,204 | KALENG | BANTUAN PKBM INSAN CERDAS |
| 2 | GULA | 207,700 | 20,700 | KG | BANTUAN SUPERINDO |
| 3 | MINYAK GORENG | 6,820 | 6,820 | LITER | BANTUAN PKBM INSAN CERDAS |
| 4 | BERAS | 23,945 | 23,945 | KG | BANTUAN PT. ADHIRA |
| 5 | MIE | 9,499 | 9,499 | PAKET | BANTUAN PT. ADHIRA |
| 6 | KECAP | | 0 | PACK | BANTUAN SUPERINDO |
| 7 | TEH | | 0 | PACK | BANTUAN SUPERINDO |
| 8 | KOPI | | 0 | PACK | BANTUAN KOSME |
| 9 | TAS SEMBAKO | 7,184 | 7,184 | PCS | |
| | TAS SEMBAKO RUSAK | 1,938 | 1,938 | PCS | |
| 10 | PAKET SEMBAKO | 592 | 592 | PAKET | BANTUAN PANSAKA |

Sumber : BPBD Jawa Timur 2021

Berdasarkan table 4.1 tata kelola logistik BPBD sudah sangat terarut. Selain penataan logistik, berdasarkan hasil wawancara mekanisme penataan Gudang BPBD Jawa timur sebagai berikut :

1. Penerimaan

Penerimaan merupakan proses penyerahan dan penerimaan logistik dan peralatan di gudang. Dalam proses penyerahan dan penerimaan ini dilakukan:

- a) Pendataan jumlah dan mutu logistik dan peralatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku/layak untuk diberikan kepada korban bencana.
- b) Pencatatan administratif sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan.

2. Penyimpanan

Penyimpanan merupakan proses kegiatan penyimpanan logistik dan peralatan di gudang dengan cara menempatkan logistik dan peralatan yang diterima:

- a. Penempatan sesuai denah.
- b. Aman dari pencurian.
- c. Aman dari gangguan fisik
- d. Aman dari pencemaran secara kimiawi dan biologi yang dapat merusak kualitas dan kuantitas.
- e. Aman dari kebakaran.
- f. Penataan sesuai dengan standar pergudangan.

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan logistik dan peralatan agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan dalam penanggulangan bencana secara efektif dan efisien dan akuntabel melalui prinsip:

- a. 5 R = Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin (secara terus menerus).
- b. First In First Out (FIFO) yaitu logistik dan peralatan yang pertama masuk adalah yang pertama harus keluar.

- c. First Expired Date First Out (FEFO) yaitu logistik dan peralatan yang pertama kadaluarsa harus yang pertama keluar untuk didistribusikan. Dalam penyusunan logistik dan peralatan yang punya masa kadaluwarsanya lebih awal atau yang diterima lebih awal harus digunakan lebih awal sebab logistik dan peralatan yang datang lebih awal biasanya juga diproduksi lebih awal dan umumnya relatif lebih tua dan masa kadaluwarsanya mungkin lebih awal.
- d. Logistik dan peralatan disusun di atas pallet secara rapih dan teratur, sesuai dengan ketentuan.

4. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan proses kegiatan pengeluaran dan penyaluran logistik dan peralatan dari gudang untuk diserahkan kepada yang berhak, melalui suatu proses serah terima yang dapat dipertanggungjawabkan, disertai bukti serah terima. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana.

5. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses kegiatan pengawasan atas pergerakan masuk keluarnya logistik dan peralatan dari dan ke gudang agar persediaan dan penempatan dapat diketahui secara cepat, tepat dan akurat serta akuntabel. Pengendalian dilaksanakan dengan menggunakan formulir dalam lampiran.

6. Penghapusan

Penghapusan merupakan kegiatan pemusnahan logistik dan peralatan dalam rangka pembebasan barang milik/kekayaan negara dari tanggung jawab

berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tujuan penghapusan adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusan merupakan bentuk pertanggungjawaban administrasi petugas terhadap logistik dan peralatan yang dikelola, yang sudah ditetapkan untuk dihapuskan/dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menghindari pembiayaan (biaya penyimpanan, pemeliharaan, penjagaan dan lain-lain) atau barang yang sudah tidak layak untuk dipelihara.
- c. Menjaga keselamatan agar terhindar dari pencemaran lingkungan.

Kegiatan penghapusan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat daftar logistik dan peralatan yang akan dihapuskan beserta alasan-alasannya.
- 2) Pisahkan logistik dan peralatan yang kadaluarsa/rusak pada tempat tertentu sampai pelaksanaan pemusnahan.
- 3) Melaporkan kepada atasan mengenai logistik dan peralatan yang akan dihapuskan.
- 4) Membentuk panitia pencelaan dan penghapusan logistik dan peralatan melalui surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
- 5) Membuat berita acara hasil pencelaan dan penghapusan logistik dan peralatan yang akan dihapuskan.
- 6) Melaporkan hasil pencelaan dan penghapusan kepada pejabat yang berwenang.

4.2.3 Perawatan Logistik

Permendagri No.17 Tahun 2007

Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. pemeliharaan logistik juga memiliki sasaran dan tujuan adapun tujuan dari suatu pemeliharaan logistik menurut Kepmendagri No. 17 Tahun 2007 adalah semua barang-barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris. Jadi segala barang yang tertera dalam buku inventaris perusahaan harus dipelihara sedangkan yang tidak tercantum dalam buku inventaris tidak ada suatu kewajiban untuk melakukan suatu pemeliharaan. Pemeliharaan logistik juga memiliki beberapa tujuan, antara lain: 1. Menjaga dan menjamin setiap logistik yang ada tetap mampu berfungsi sebagaimana mestinya sewaktu logistik tersebut dibutuhkan sehingga kegiatankegiatan dalam organisasi tidak mengalami hambatan/stagnasi.

Hal ini berkaitan dengan operasional dari barang-barang logistik yang dipelihara. Agar suatu barang yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tersebut tetap bisa beroperasi dengan baik maka dibutuhkan suatu pemeliharaan. Sehingga nantinya ketika barang tersebut akan dipakai sewaktu-waktu barang tersebut tetap bisa dijalankan tanpa menghambat keberjalanan dari organisasi tersebut. Contohnya: sebuah organisasi memiliki mobil. Mobil tersebut memiliki kegunaan yang sangat penting bagi organisasi tersebut. Untuk suatu waktu organisasi tersebut tidak menggunakan mobil tersebut untuk beberapa waktu. Meskipun tidak dipergunakan, sudah seharusnya mobil tersebut harus dipelihara. Misalnya dengan memanasi mobil tersebut setiap hari, mencucinya minimal setiap

minggu, dll. 1. Agar nantinya ketika secara tiba-tiba mobil tersebut akan dipergunakan tidak menghambat kegiatan organisasi tersebut. 2. Agar umur pemakaian logistik dapat mencapai batas waktu yang optimal (sesuai batas waktu yg ditetapkan). Tujuan ini berkaitan dengan tingkat keawetan dari logistik tersebut. Setiap barang logistik sebenarnya telah memiliki umur ekonomis, yaitu suatu batas waktu yang diperhitungkan dari masa pakai barang tersebut. Agar waktu tersebut dapat sesuai dengan yang direncanakan diperlukan suatu pemeliharaan logistik yang baik dan benar. 3. Mendukung efisiensi organisasi Tujuan yang ketiga ini sebenarnya merupakan tujuan utama dari pemeliharaan logistik. Tujuan utama dari sebuah organisasi adalah mencapai cita-cita organisasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan suatu sarana dan prasarana yang baik. Sarana dan prasarana tersebut berupa barang-barang logistik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Agar nantinya barang-barang tersebut tetap dapat digunakan oleh perusahaan dalam rangka efisiensi perusahaan maka dibutuhkan suatu pemeliharaan logistik.

Seperti yang tercantum pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 mengenai pedoman standarisasi logistik. Berikut ini beberapa jenis bantuan logistik penanggulangan bencana:

1. Bantuan Tempat Penampungan/Hunian Sementara

Bantuan penampungan/hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

2. Bantuan Pangan

Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum.

3. Bantuan Non Pangan

Bantuan non pangan diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk :

- a. Peralatan Memasak dan Makan
- b. Kompor, Bahan Bakar, dan Penerangan
- c. Alat-alat dan Perkakas

4. Bantuan Sandang

- a. Perlengkapan Pribadi
- b. Kebersihan Pribadi

Tiap rumah tangga memperoleh kemudahan mendapatkan bantuan sabun mandi dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta martabat manusia.

5. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

- a. Bantuan Air Bersih
- b. Bantuan Air Minum
- c. Bantuan Sanitasi

6. Bantuan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan Kesehatan klinis, pengendalian penyakit menular, dan pengendalian penyakit tidak menular.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Agung, Staff Kasi Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur yang menyatakan :

“terkait dengan seputar perawatn logistik, setiap waktu akan selalu dicek secara rutin untuk kualitas logistik yang sudah ada di gudang. Semua logistik digabung menjadi satu, dan di plot sesuai dengan jenis logistik yang tersedia di gudang”.

Hasil wawancara diatas dilakukan dengan Bapak Agung, pada tanggal 17 Januari 2022.

4.2.4 Faktor Penghambat dan Pendukung tata kelola pergudangan dan logistik

Secara umum, sistem logistik Indonesia saat ini belum memiliki kesatuan visi yang dapat mendukung daya saing pelaku ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan pembinaan dan kewenangan. Kegiatan terkait logistik masih relatif parsial dan sektoral di kementerian terkait, sementara koordinasi yang ada belum memadai untuk bersinergi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Kegiatan pergudangan dan logistik terdiri dari berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pengendalian. Jika aktivitas tersebut dilakukan dengan baik, maka dapat melakukan aktivitas dengan baik, seperti melaksanakan persiapan penyediaan barang.

Faktor pendukung tata kelola pergudangan dan logistik dalam aktivitas penyimpanan akan memberikan hasil pengurangan dari kegiatan barang. Selain itu, terdapat penyaluran dana bantuan dari BUMN, BUMD, dan Swasta yang turut membantu menambah sarana prasarana dari pergudangan. Berdasarkan dari wawancara bersama Bapak Bige selaku Kepala Seksi Logistik BPBD Provinsi

Jawa Timur dan Bapak Agung selaku Staff Kasi Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur.

Faktor penghambat tata kelola pergudangan dan logistik di BPBD Jawa Timur adalah kurangnya transportasi yang dimiliki oleh BPBD Jawa Timur sehingga untuk pendistribusian logistik dan peralatan bantuan tanggap bencana sedikit terhambat, belum terdapat pengelolaan gudang dan logistik yang langsung terintegrasi dengan masing – masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hal tersebut mengakibatkan miss komunikasi antara BPBD Jawa Timur dengan masing – masing BPBD di Kabupaten/Kota tentang adanya persediaan barang ataupun barang – barang apa yang seharusnya di perlukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Bige, Kepala Seksi Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur yang menyatakan :

“Kelebihan dari tata kelola pergudangan mungkin adanya bantuan masuk ntah dari BUMN, BUMD, maupun dari pihak swasta yang membantu memenuhi pergudangan dan juga logistik BPBD Jawa Timur. Kemudian untuk kelemahan sendiri kita belum bisa mengelola langsung pergudangan dan logistik yang langsung terintegrasi ke wilayah, takutnya kalau ada miskom antara BPBD Jatim dengan yang ada di daerah”.

Hasil wawancara diatas dilakukan dengan Bapak Bige, pada tanggal 21 Desember 2021.

4.2.5 Rekomendasi kebijakan tata kelola Pergudangan dan logistik

Berdasarkan hasil wawancara dan identifikasi permasalahan, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi kekurangan dari tata kelola pergudangan dan logistik di BPBD Jawa Timur adalah belum dapat mengelola dengan baik persediaan barang yang sehingga sering terjadi miskom antara BPBD Jawa Timur dengan di daerah terutama terkait logistik. Berdasarkan permasalahan tersebut

maka rekomendasi kebijakan dari tata kelola pergudangan dan logistik adalah membuat suatu aplikasi yang berbasis analisis dan perakitan yang terintegrasi di seluruh BPBD Kabupaten/Kota. Nantinya aplikasi tersebut dapat menyalurkan logpal yang terencana, tepat, dan berdaya guna. Yang akan dilakukan oleh aplikasi tersebut adalah melakukan monitoring dan evaluasi oleh BPBD Jawa Timur dan lintas Sektor (Inspektorat Jatim) ke seluruh Kab/Kota terkait kapasitas logpal yang tersedia di Kab/kota tersebut. Selain itu, hasil monev merupakan rekomendasi terkait dengan Pengadaan Perencanaan Kebutuhan Logpal di Kabupaten dan Kota. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Agung, Staff Kasi Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur yang menyatakan :

“Terkait dengan rekomendasi yang saat ini disarankan untuk pengelolaan pergudangan dan logistik di BPBD Jawa Timur adalah pembuatan aplikasi Aplikasi Logistik Penanggulangan Bencana (Lencana Tangguh), tujuan aplikasi itu adalah dapat menyalurkan secara terencana, tepat dan berdaya guna”.

Hasil wawancara diatas dilakukan dengan Bapak Agung, pada tanggal 17 Desember 2022.

4.2.6 Sisem Pencacatan Administrasi Pergudangan

Sistem administrasi gudang adalah sebuah sistem pencatatan serta pengendalian atau pengelolaan secara mendetail mengenai keluar masuknya barang pada suatu gudang di perusahaan dan instansi. Sistem ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan proses pengelolaan gudang karena sistem ini mampu mengontrol pergerakan barang sehingga kita dapat mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran barang lengkap dengan keterangan kualitas dan berbagai atribut barang yang tersedia dalam suatu periode. Sistem administrasi gudang mengurus berbagai macam data gudang seperti data

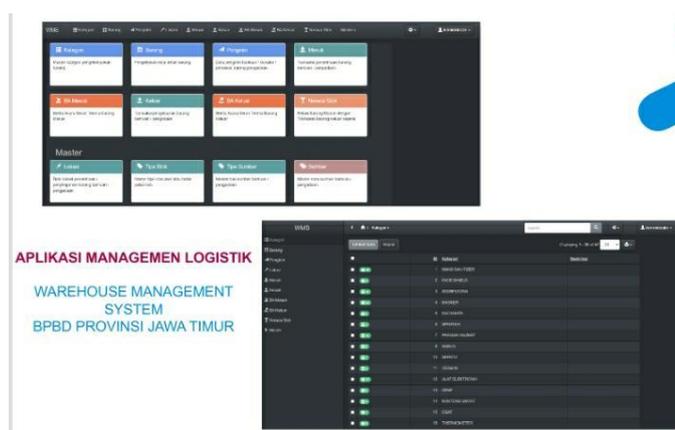
pemesanan barang, data persediaan barang, data pengeluaran barang dan data permintaan barang bahkan sampai data perkiraan permintaan. Mengingat data-data yang begitu kompleks, akan sangat membutuhkan bantuan software manajemen gudang guna menangani semua data tersebut secara terintegrasi.

Software yang umum digunakan untuk mengatur siste administrasi Gudang ini biasa disebut dengan *Warehouse Management System (WMS)*. Dengan keberadaan software manajemen gudang yang dapat mnsupport aktifitas pergudangan akan sangat membantu anda dalam melacak informai yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Agung, Staff Kasi Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur yang menyatakan :

“Proses pencatatan yang digunakan oleh BPBD Provisini JawaTimur selama ini yang pertama menggunakan sistem manual dan kemudian diinput menggunakan sistem warehouse management system BPBD Provinsi Jawa Timur. Pengecekan barang dilakukan setiap satu minggu sekali dan satu bulan sekali”.

Hasil wawancara diatas dilakukan dengan Bapak Agung , pada tanggal 25

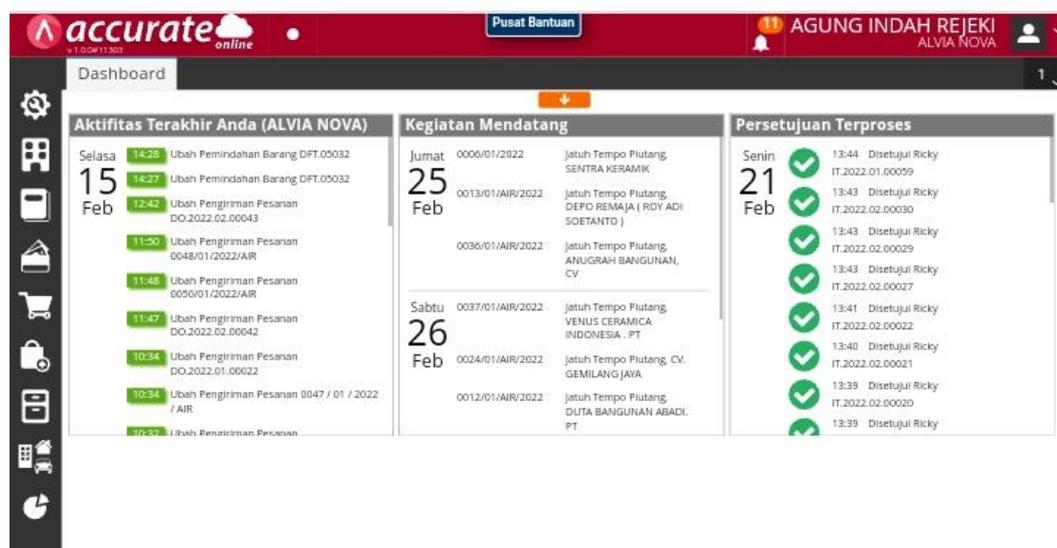
Februari 2022.



Gambar 4.4 WareHouse Management System

Sumber : BPBD Provisini Jawa Timur

Sedangkan di tempat bekerja peneliti di gudang swasta menggunakan Program accurate, tetapi bila terjadi selisih peneliti mencari dengan melihat laporan manual dan mengecek fisik yang tersedia di gudang Swasta. Pengecekan dilakukan setiap hari melalui accurate dan pengecekan selama satu bulan sekali secara global mulai dari manual, fisik, dan program.



Gambar 4.5 Program Accurate

Sumber : Dokumentasi Peneliti

4.2.7 Evaluasi Penggunaan Software Accurate

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam mengambil keputusan. (Widoyoko, 2012 : 4) Dengan demikian, evaluasi kinerja dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupun organisasi secara keseluruhan. Tujuan dari evaluasi kinerja menurut James E. Neal Jr (2005:4-5) adalah:

1. Mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan karyawan
2. Mengidentifikasi potensi perkembangan karyawan
3. Untuk memberikan informasi bagi perkembangan karyawan
4. Untuk membuat organisasi lebih produktif
5. Untuk memberikan data bagi kompensasi karyawan yang sesuai
6. Untuk memproteksi organisasi dari tuntutan hukum perburuhan.

Dalam cakupan yang lebih umum, Payaman Simanjuntak (2005:106) menyatakan bahwa tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, terutama bila terjadi kelambatan atau penyimpangan. Tujuan dari evaluasi kinerja menurut Mangkunegara (2005:10) adalah untuk :

- 1) Meningkatkan saling pengertian di antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
- 2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.

- 3) Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
- 4) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai potensinya.
- 5) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang ingin diubah.

Pengertian dan fungsi accurate software accounting ACCURATE Accounting Software dikembangkan sejak 1999 oleh PT Cipta Piranti Sejahtera (CPSSoft Developer of ACCURATE Software) dan 16 telah diaplikasikan oleh lebih dari 50.000 pengguna dan Bekerja sama dengan lebih dari 30 Universitas terkemuka Indonesia sebagai mitra Accurate. Accurate adalah piranti lunak akuntansi buatan Indonesia Program ini memiliki fungsi yang sama seperti Peachtre accounting(USA), Simply Accounting (Canada), Dan Myob Accounting(Australia).

Dibandingkan program-program impor tersebut Accurate memiliki kelebihan, yaitu dapat menggunakan menu berbahasa Indonesia dan kompatibel dengan aturan perpajakan di Indonesia (Sulistiawati 2005) Menurut Mahmudi (20016) beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menggunakan Accurate sebagai tools (alat bantu) yang membantu proses pekerjaan anda supaya lebih cepat, mudah, dan menyenangkan diantaranya:

1. *User friendly* (mudah digunakan).

2. Tingkat keamanan (*security*) yang valid, karena setiap User biasa diatur Password-ya masing-masing untuk setiap aktivitas dengan 3 tingkatan yaitu untuk membuat (*create*), merubah (*edit*) dan melaporkan (*report*).
3. Kemampuan *explore* semua laporan kedalam media excel, fle.pdf, csv, ile.rtf,file.txt.
4. Dibuat oleh perusahaan di Indonesia (Jakarta), sehingga jika terjadi kerusakan terhadap data dengan cepat ditangani oleh developer secara langsung dan jika ingin bertanya-tanya langsung tentang cara pemakaian 17 dapat datang langsung ke developer atau melalui telepon dengan tarif lokal yang murah.
5. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia terutama dalam penentuan metode pencatatan dan perhitungan yang diatur dalam SAK tersebut.
6. Tersedianya 2 pilihan menu bahasa yang diinginkan yaitu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
7. Terhubungan dengan laporan perpajakan Indonesia seperti pembuatan faktur pajak standar, pelaporan SPT Masa, PPN 1195, dan SPT tahun PPH Badan Formulir 1771.

Fitur yang diberikan oleh accurate, sebagai berikut :

- 1) Multi fungsi
 - a. Multi currencis, dapat mencatat transaksi mata uang asing terutama untuk akun tipe kas/bank, piutang dan utang. Setiap terjadi perubahan kurs saat pembelian/penjualan dengan pembayaran utang/piutang akan dicatat secara otomatis sebagai realisasi kurs (*realized gain/lass*) untuk setiap mata uang.

Setiap akhir bulan (periode) disediakan fasilitas period end untuk menghitung jumlah unrealize gain/loss dari kurs pada awal periode dengan kurs saat akhir periode pada bulan yang bersangkutan.

- b. Multi warahouse, dapat mengetahui posisi kuantitas suatu barang berada di gudang saja.
- c. Multi user, beberapa orang dapat mengakses satu data yang sama di komputer yang berlainan yang sudah terhubung dengan jaringan sesuai dengan akses dan password masing-masing.
- d. Multi sale tax, setiap faktur pembelian maupun penjualan dapat menghitung 2 tingkat pajak penjualan yaitu PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).
- e. Multi discount, setiap faktur untuk masing-masing barang dapat ditentukan masing-masing diskon dengan diskon yang bertingkat. Diskon setiap faktur diisikan dalam jumlah presentase bertingkat atau langsung jumlah angka yang biasanya digunakan untuk diskon pembuatan di bagian bawah faktur.
- f. Multi saleman, setiap faktur penjualan dapat dipilih siapa penjualan dengan penentuan batasan komisi yang akan diberikan kepada penjualan tersebut.
- g. Multi form template, setiap formulir isian dapat didesain sendiri dengan lebih dari satu macam jenis cetakan voucher. Misalnya perusahaan dapat membedakan cetak untuk faktur pajak standar, faktur pajak komersial, faktur tagihan untuk tipe pelanggan tertentu dan lainnya.
- h. Multi unit, setiap item barang (inventory part) dapat dibagi satuannya dalam tiga tingkatan dimana tingkatan pertama (unit 1) sebagai unit default dalam

perhitungan setiap kuantitasnya. Setiap tingkatan berikutnya dikalikan dengan standar unit 1 tersebut.

- 2) Bilingual (dua bahasa), dapat ditampilkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- 3) Pilihan metode perhitungan persediaan antara metode rata-rata (average) atau FIFO dengan pencatatan metode perpetual.
- 4) Modul yang sudah dijadikan dalam satu paket, dimana setiap modul terdiri dari beberapa aktivitas sehari-hari dan menghasilkan satu laporan terpadu.
- 5) Customize report, satu jenis laporan yang sudah disediakan dapat dikustomisasi sendiri oleh user menjadi puluhan bahkan ratusan jenis laporan yang sudah dimodifikasi sesuai dengan pengelompokan dan tampilan yang diinginkan oleh user sendiri. Perubahan ukuran lebar kolom yang dapat diatur sendiri user dengan mudah tampilan jenis angka huruf, warna, dan skala perhitungan setiap angka di laporan.
- 6) Client server, dari beberapa pilihan jenis jaringan yang akan digunakan Accurate memilih jaringan model client server sebagai model jaringan yang menjamin sampainya data yang diinput oleh user ke dalam server. Model kerja sistem client server ini adalah data base diletakan satu komputer, sebut saja di sebut server, sedangkan user memasukan data di komputer lainya yang di sebut dengan client. Fungsi utamanya yaitu sebagai Software Accounting, Bisa dipastikan bahwa ACCURATE Accounting Software cocok diaplikasikan di hampir semua jenis usaha baik Trading, Service, Kontraktor, ataupun Manufaktur.

ACCURATE Accounting Software membantu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sekejap, meskipun pengguna tidak mengerti Akunting sama sekali. Accurate Software dirancang dalam dua bahasa (Inggris, Indonesia) dengan Interface User Friendly yang sangat mudah digunakan, tentunya dengan Hasil yang Akurat. Untuk warehouse system di BPBD masih menggunakan sistem pencatatan gudang logistik secara manual sehingga dibandingkan dengan tempat peneliti bekerja yang menggunakan aplikasi accurate yang jauh lebih efektif dan cepat dimana tempat peneliti bekerja. Pembukuan yang dilakukan secara manual akan lebih sulit untuk mengawasi arus keluar masuk barang, kurang akurat dan akan menyita waktu lebih banyak untuk pengecekan stok barang selain itu juga berbahaya bagi keamanan data. Keunggulan penggunaan aplikasi accurate yaitu dengan menggunakan peralatan komputer, transaksi dan prosedur akuntansi yang rumit dapat diprogram dengan lebih mudah. Hanya dengan menginput tanggal, kode akun dan jumlah transaksi dapat secara otomatis menghasilkan jurnal, posting buku besar, laporan biaya produksi dan laporan keuangan. Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi perusahaan dan sumber daya manusia dan dapat diselesaikan secara praktis, cepat dan akurat. Accurate selain memiliki manfaat, aplikasi ini juga memiliki beberapa kekurangan yaitu:

- a. Aplikasi accurate ini tidak bisa dicostum oleh pengguna
- b. Accurate tidak mencakup semua kegiatan operasional perusahaan
- c. Accurate tidak memiliki training pembelian baru.(Ananta, 2019)

Berikut merupakan perbedaan penggunaan pembukuan secara manual dan menggunakan aplikasi accurate

Tabel 4.3 Perbedaan Penggunaan Pembukuan Manual Dan Menggunakan Aplikasi Accurate

| Manual | Software Accurate |
|--|--|
| Membuat dan menghafalkan rumus-rumus tertentu. | Hanya perlu menginput data transaksi melalui sistem software. |
| Proses pembukuan harus dilakukan dengan mencatat secara manual. | Seluruh proses pembukuan dapat dilakukan secara otomatis. |
| Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pembukuan. | Proses pembukuan jauh lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. |
| Terjadinya kesalahan dalam mencatat data. | Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penginputan. |
| Sulit untuk mengorganisasikan data-data. | Pengorganisasian data-data transaksi dapat dilakukan dengan mudah. |

Sumber : Analisis peneliti

4.3 Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan, sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya dengan cara yang relevan. Pembahasan mengacu pada pertanyaan peneliti yaitu membahas tentang analisis penelitian di BPBD Provinsi Jawa Timur ditinjau dari analisis kebijakan retrospektif, yang mana retrospektif ialah pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi, bertujuan untuk mencari faktor yang berhubungan dengan penyebab masalah pada analisis kebijakan. Teknik dan strategi untuk mengelola pergudangan dan logistik BPBD sebagai tempat penyimpanan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana saat ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Kebijakan yang telah dilakukan meliputi adanya penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan untuk bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana juga telah dilaksanakan oleh BPBD Jawa Timur.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan di waktu jam kerja/hal tersebut mengakibatkan selama proses wawancara, beberapa waktu sekali harus diselingi oleh kegiatan yang pada dasarnya harus dikerjakan oleh informan. Hal ini sedikit berpengaruh terhadap proses wawancara, karena bagaimanapun akan mempengaruhi konsentrasi pengumpulan data dari informan maupun peneliti. Berdasarkan hasil Analisa dilapangan, Analisis kebijakan yang di terapkan BPBD Jawa Timur Perencanaan/inventarisasi kebutuhan di BPBD Provinsi Jawa timur telah dilakukan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya tim perencanaan logistik yang berfokus pada inventarisasi kebutuhan. Selain itu, tim perencanaan juga telah memiliki rencana operasional untuk tahun yang akan datang dan menjadikan rencana sebelumnya menjadi pedoman. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dunn yang mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah "suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik". Dunn mengatakan keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu: Proses pengkajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan dan proses komunikasi kebijakan, (Dunn, 2003:1).

a) Tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur

Proses tata Kelola pergudangan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui tahapan wawancara secara langsung dengan pakar (expert) yang berada di lingkup kerja logistik BPBD Jawa Timur. Dalam penelitian ini, pakar yang dipilih untuk di wawancarai proses logistik kemanusiaan adalah kepala seksi logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, staff

bidang kedaruratan dan logistik, dan staf kasi logistik BPBD Provinsi Jawa Timur.

Pemetaan ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi aktivitas serta ruang lingkup logistik dan pergudangan. Selain itu pemetaan ini membantu dalam mengidentifikasi risiko, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui dimana risiko tersebut muncul. Dari hasil wawancara tersebut, maka didapatkan pemetaan proses logistik kemanusiaan seperti pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.4 TATA KELOLA LOGISTIK BPBD JAWA TIMUR

| PROSES | AKTIVITAS |
|--------------------------------------|--|
| Perencanaan/ Inventarisasi Kebutuhan | 1) Perencanaan standart kebutuhan minimum 2) Penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah, panjang |
| Pengadaan dan/atau Penerimaan | 1) Pencatatan atau inventarisasi barang yang diterima 2) Pengadaan logistik dan peralatan 3) Memeriksa hasil pengerjaan |
| Penyimpanan dan/atau pergudangan | 1) Pencatatan data penerimaan barang masuk ke gudang 2) Penyerahan dan penerimaan logistik dan peralatan di gudang 3) penyimpanan logistik dan peralatan di gudang dengan cara menempatkan logistik dan peralatan yang diterima 4) Perawatan logistik dan peralatan |
| Pendistribusian | 1) Perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan 2) Pengeluaran dan penyaluran logistik dan peralatan dari gudang |
| Pengangkutan | Melakukan pengangkutan atau pemindahan logistik dan peralatan ke tempat tujuan |
| Penerimaan di Tujuan | 1) Pencocokan data sesuai dengan berita acara 2) Melakukan pemeriksaan barang meliputi jenis, jumlah dan kondisi barang 3) Legalisasi berita acara serah terima dan bukti penerimaan |
| Penghapusan | Penghapusan terhadap barang yang rusak, tidak layak dan tidak bernilai ekonomis |
| Pertanggungjawaban | Membuat laporan pertanggung jawaban |

SUMBER : BPBD JAWA TIMUR 2021 (WAWANCARA DENGAN BAPAK AINUL, STAFF LOGISTIK BPBD JAWA TIMUR 21 DESEMBER 2021)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di lapangan proses tata kelola gudang, logistik dan peralatan BPBD Jawa timur Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 06 Tahun 2009 tentang Pedoman

Pergudangan. Selain mengenai tata kelola logistik, hasil wawancara peneliti dengan pihak BPBD mekanisme yang telah dilakukan saat ini adalah analisis kebijakan, namun ada beberapa kendala dalam melakukan tata kelola pergudangan dan logistik tersebut adalah ketika terjadi bencana, tata kelola distribusi, terkait inisiatif dari BPBD bantuan logistik sifat dasar kebutuhan bencana dan permohonan dari kabupaten dan kota. Proses penerimaan berupa pendataan yang dilakukan pencatatan administratif sebagai dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan, proses penyimpanan barang sesuai denah, aman dari pencuri, pemeliharaan perawatan logistik dan peralatan agar kondisi tetap terjaga dan juga siap untuk dipergunakan.

b) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan atau pendukung tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi tata kelola pergudangan logistik dan peralatan

1. Faktor Penghambat :

BPBD Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan bencana masih terkendala dari kekurangan sarana dan prasarana transportasi yaitu : Mobil pengambil korban dan peralatan dalam mendukung bantuan khusus. Kurangnya transportasi dapat menghambat jalannya mitigasi bencana dan juga pendistribusian logistik dari BPBD Jawa Timur ke tempat kejadian bencana. Selain itu kurangnya barang yang dibutuhkan saat awal bencana, hal ini menjadi evaluasi untuk BPBD Jawa Timur yang nantinya harus ada pengadministrasian

yang langsung terintegrasi ke daerah Kabupaten/Kota untuk pendistribusian barang-barang yang dibutuhkan agar nantinya tidak terdapat kekurangan di posko bencana. Berikut ini merupakan faktor-faktor penghambat pada proses logistik BPBD Jawa Timur.

Tabel 4.5 FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT LOGISTIK BPBD JATIM

| NO. | PENGHAMBAT |
|-----|---|
| 1 | Melesetnya perkiraan kebutuhan logistik dan peralatan |
| 2 | Kesalahan pendataan barang yang diterima |
| 3 | Barang sesuai spesifikasi tidak terbeli |
| 4 | Barang yang dipesan tidak sesuai dengan perencanaan |
| 5 | Kurangnya ketersediaan barang dipasar/agen |
| 6 | Kesalahan pendataan jumlah dan mutu tidak sesuai dengan ketentuan |
| 7 | Barang mengalami kerusakan/ tidak layak |
| 8 | Barang expired/kadaluarsa |
| 9 | Pembatalan pengiriman logistik dan peralatan |
| 10 | Kesalahan pada proses perhitungan pengeluaran barang |
| 11 | Kurang ketersediaan alat transportasi |
| 12 | Terputusnya jalur transportasi |
| 13 | Ketidaksesuaian bantuan yang diterima seperti jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan kebutuhan |

SUMBER : BPBD JAWA TIMUR 2022

2. Faktor pendukung

Terdapat pembiayaan bersumber dari dana sumbangan yang berasal dari BUMN, BUMD, dan juga pihak swasta. Hal tersebut dapat menambah dan meningkatkan fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh BPBD Jawa Timur. Selain itu peralatan dan sarana pendukung pergudangan selalu tersedia untuk mendukung kelancaran penerimaan dan pengeluaran barang jika sewaktu-waktu mengeluarkan mudah dimobilisasi dan didistribusikan bila terjadi bencana. Berikut merupakan proses penerimaan barang datang.



Gambar 4.6 Proses Penataan Penerimaan Barang Datang

Sumber : BPBD Jawa Timur 2022

- c) Rekomendasi kebijakan tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa timur

Rekomendasi kebijakan tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa timur adalah diadakan monitoring dan evaluasi berupa pemantauan dari tahun ke tahun dan menyimpulkan untuk kebutuhan tahun ini akan menjadi acuan untuk kebutuhan tahun yang akan mendatang. Perlu adanya aplikasi berbasis manajemen logistik dan peralatan yang nantinya dapat terintegrasi diseluruh kabupaten/kota untuk penyaluran logpal yang terencana, tepat dan berdaya guna yang berguna untuk memantau pergudangan sampai pelaksanaan distribusi sehingga tercapai tujuan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terpadu, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan jaminan dan kuantitas serta kualitas.

Selain itu rekomendasi untuk tata kelola pergudangan, logistik dan peralatan BPBD perlu adanya inovasi baru dengan melakukan ujicoba aplikasi

logistik penanggulangan bencana (LENCANA TANGGUH) dalam efektivitas pengelolaan data ketersediaan logistik di Indonesia. LENCANA TANGGUH adalah aplikasi Web-Based yang hanya membutuhkan Browser (mesin pencarian) dan koneksi internet. Dalam hal ini unit Logistik BNPB menggunakan browser Google Chrome yang mempunyai kelebihan proses loading lebih cepat, karena membutuhkan resources yang rendah. Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk pergudangan logistik yang mempunyai fitur barang masuk, barang keluar, proses pengiriman barang, dan pelaporan data gudang. Hal yang berbeda ada pada menu cetak BAST dan terlihat lokasi sebaran penyediaan barang di Provinsi, kabupaten / Kota. Kelebihan utama aplikasi ini dapat digunakan secara online dan offline. Pada saat input data secara online, pengguna dapat mengisi manual dengan kolom-kolom yang sudah disediakan kemudian klik save, maka data akan otomatis tersimpan jika internet dalam keadaan stabil. Sedangkan via Offline, pengguna harus mendownload Excell yang sudah disetting atau dibuatkan tabel-tabelnya, kemudian diisi secara manual hingga data sudah terinput semua. Jika sudah selesai bisa di attach file kembali ke aplikasi LENCANA TANGGUH, maka sistem akan otomatis mengolah data tersebut dan dapat dijadikan database. Inovasi dalam pengelolaan logistik ini diharapkan menjadikan tata kelola yang baik di daerah maupun nasional. Tantangan kedepan untuk BPBD Jawa Timur selalu melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Berinovasi dan kolaborasi, berinovasi dalam proses, serta berinovasi dalam pelayanan publik ke masyarakat, BPBD dan terbuka dalam menerima perubahan. Selain itu, pentingnya teknologi yang mendukung sistem logistik penanggulangan bencana akan meningkatkan

efektifitas pemberian bantuan logistik dari pusat ke daerah dan masyarakat. Teknologi informatika menjadi sangat penting dan sangat diperlukan saat melakukan perencanaan sampai dengan penghapusan untuk melakukan efisiensi waktu menjadi lebih cepat. BNPB saat ini sudah melakukan kerjasama dengan Bukalapak, Garuda, dan dunia usaha untuk melakukan percepatan pengiriman logistik. Kerjasama dengan Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan media) akan lebih banyak peluang melakukan terobosan-terobosan. Proses siklus logistik dalam penanggulangan bencana dalam beberapa tahap, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan/ pergudangan, distribusi, dan penghapusan. Tantangan-tantangan BPBD Jawa Timur dalam waktu yang akan datang akan menghadapi, antara lain adalah :

- 1) Lingkungannya berubah, dituntut memberikan layanan dengan cara lebih baik, kualitas lebih baik, dan lebih cepat. Artinya dituntut melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih efisien dengan dukungan teknologi informatika.
- 2) Jarak/gap antara kebutuhan infra struktur dan persepsi pengelola masih lebar.
- 3) Investasi pengembangan infrastruktur masih kecil dan pendelegasian wewenang inovasi belum optimal.
- 4) Penyelenggaraan negara wajib mengelola sistem informasi diatur UU No. 25 tahun 2009
- 5) Pasal 23 ayat 4. Serta PermenPanRB 13 tahun 2017, pasal 3 pimpinan penyelenggara negara wajib memastikan penyediaan informasi pelayanan publik.

Dampak positif penggunaan IT adalah pelayanan menjadi lebih baik kepada masyarakat, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum, pemberdayaan masyarakat melalui informasi mudah diperoleh, dengan adanya informasi yang mencukupi masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya sendiri, hilangnya birokrasi yang panjang. Adanya e-government sekarang ini akan berimbas pada sumber daya manusia di setiap pelayanan publik.

d) Sistem Pencatatan administrasi Gudang

Bahwa penggunaan pencatatan administrasi pergudangan di BPBD menggunakan program Warehouse Management system dan manual. Pengecekan stok barang di gudang BPBD Provinsi Jawa Timur dilakukan selama satu minggu sekali dan satu bulan sekali. Sedangkan di gudang swasta menggunakan program accurate dan manual jika terjadi selisih antara fisik dan program. Pengecekan di gudang swasta dilaksanakan setiap hari dengan melihat data di program accurate. Sistem pengecekan secara global dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dengan pengecekan mulai dari fisik, manual, dan program.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Kebijakan Tata Kelola Pergudangan Logistik dan Kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur, maka kesimpulan dari penelitian ini ialah

- a) Hasil analisa kebijakan Tata Kelola Pergudangan Logistik dan Kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan tata kelola pengadaan logistik dan peralatan BPBD Jawa Timur didasari dengan pemenuhan dasar kebutuhan sesuai pedoman kepala BNPB No. 7 tahun 2008, yaitu : Penampung sementara, Bantuan pangan, Sandang, Air Bersih, Pelayanan Kesehatan. Sedangkan dengan prinsip : cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabilitas, kemitraan, pemerdayaan, Non diskriminasi, dan Non proletasi.
- b) Faktor Penghambat dan Pendukung tata kelola pergudangan dan logistik adalah kurangnya transportasi untuk mendukung mobilitas jalannya pendistribusian, belum terdapat pengadministrasian yang terintegritas dengan setiap Kabupaten dan Kota untuk memudahkan komunikasi terkait stok barang logistik dan peralatan.
- c) Rekomendasi tata kelola pergudangan logistik dan peralatan adalah monitoring dan evaluasi berupa pemantauan dari tahun ke tahun dan menyimpulkan untuk kebutuhan tahun ini akan menjadi acuan untuk kebutuhan tahun yang akan mendatang. Perlu adanya aplikasi berbasis

manajemen logistik dan peralatan yang nantinya dapat terintegrasi diseluruh kabupaten/kota untuk penyaluran lokal yang terencana, tepat dan berdaya guna.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait dengan Analisis Kebijakan Tata Kelola Pergudangan Logistik Dan Peralatan Kebencanaan Di BPBD Provinsi Jawa Timur adalah :

- 1) Untuk mengatasi permasalahan tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur hendaknya pihak BPBD menerapkan pengadministrasi seperti yang dilakukan pihak Swasta. Untuk tata kelola BPBD menggunakan pengadministrasian secara manual, sedangkan tata kelola yang dilaksanakan pihak swasta menggunakan aplikasi yang dimana aplikasi tersebut dapat memudahkan dalam proses penginputan dan pengecekan stock sehingga dapat lebih efektif dan tepat guna.
- 2) Untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maka BPBD dihimbau untuk mengevaluasi dan menemukan solusi hambatan-hambatan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya sehingga untuk kedepan harapannya BPBD tidak menemukan hambatan .
- 3) Harapannya untuk rekomendasi kebijakan tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa timur dapat diimplementasikan dengan baik sehingga BPBD dapat melaksanakan pekerjaannya dengan cepat tanggap dan tepat guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambert (2001), Manajemen Pergudangan Sebagai bagian dari sistem Logistik Perusahaan.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 6 Tahun 2009. Pedoman Pergudangan Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2008. Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan. Jakarta: BNPB.
- Bowersox, Donald J. Manajemen Logistik Edisi I. Jakarta: PT Bumi aksara; 2002.
- Christopher, Martin. 2011. Logistics and Supply Chain Management (4th Edition). Dorset: Prentice Hall.
- Christopher, Martin. 2011. Logistics and Supply Chain Management (4th Edition). Dorset: Prentice Hall.
- Creswell, J.W. 2008, Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, Pearson Merrill Prentice Hall, Singapore.
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Effendi, Muh. Arief. 2009. The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : CV Masagung
- Hendayani, Ratih. Mari Berkenalan dengan Manajemen Logistik. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta; 2011
- Heragu, S., 1997, Facilities Design, PWS Publishing Company, Boston.
- Jones, Charles O., 1994. Pengantar kebijakan publik. Jakarta. Raja grafindo pustaka
- Meleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Miles, M.B., Huberman, M.a, & Saldana, J, (2014), Drawing and Varying Conclusions, Qualitive Data Analysis: A Methods Sourcebok, <http://doi.org/January 11, 2022>
- Muh. Arief Effendi (2009:1) Tata Kelola Perusahaan, Jakarata
- Nazir, Mohd. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 1999. Administrasidan Administrasi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- Nugroho, D. Riant. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, implementasi danEvaluasi, Jakarta : Media Komputindo Gramedia.
- Nurjanah, dkk (2012), Manajemen Bencana. Banung : alfabet
- Patriatama, Adrianus Ardy (2012) MODEL SISTEM LOGISTIK BENCANA BERBASIS SCM BERDASARKAN KASUS ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010. S1 thesis, UAJY.

- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- Purnomo Hadi dan Sugiantoro, (2010). Manajemen Bencana : Respons dan Tindakan Terhadap Bencana . Yogyakarta : Media Pressindo.
- Purnomo, Hadi. 2010. Manajemen bencana: respons dan tindakan terhadap bencana. Jakarta:MedPress
- Ulum Chazienul. 1974.Manajemen bencana: suatu pengantar pendekatan proaktif. UB Press
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- Widodo.2010. Analisis Kebijakan Publik.Jakarta: PT Bumi Aksara
- William Dunn (2003), Analisis Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- <https://web.bnpb.go.id/jdih/download>
- <https://media.neliti.com/media/publications/81894-ID-tata-kelola-distribusi-bantuan-logistik.pdf>
- http://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf
- <https://bogorkab.go.id/post/detail/logistik-dan-peralatan-dalam-penanggulangan-bencana>
- <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/451/jbptunikompp-gdl-rhikaratin-22532-8-babii.pdf>
- https://repository.uin-suska.ac.id/12251/7/7.%20BAB%20II_2018205ADN.pdf

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**ANALISIS KEBIJAKAN TATA KELOLA PERGUDANGAN LOGISTIK
DAN PERALATAN KEBENCANAAN DI BPBD PROVINSI JAWA TIMUR**



Oleh :

Alvia Nova Hariyani

2018020002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS DR. SOETOMO

SURABAYA

2021

Pedoman wawancara ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menjawab beberapa masalah yang diangkat oleh peneliti sebagaimana judul penelitian :

(ANALISIS KEBIJAKAN TATA KELOLA PERGUDANGAN LOGISTIK DAN PERALATAN KEBENCANAAN DI BPBD PROVINSI JAWA TIMUR)

1. Bagaimana tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan atau pendukung tata kelola pergudangan logistik dan peralatan kebencanaan tersebut ?
3. Bagaimana rekomendasi kebijakan tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa timur ?

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



**YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Prodi S-1 : Ilmu Administrasi Niaga Terakreditasi B SK. No.1048/SK//BAN-PT/Akred/S/IV/2019
 Ilmu Administrasi Negara Terakreditasi A SK. No.1417/SK//BAN-PT/Akred/S/V/2017
 Prodi S-2 : Magister Ilmu Administrasi Terakreditasi B SK. No..3383/SK//BAN-PT/Akred/M/X/2017

Jl. Semolowaru No. 84 Surabaya – 60118 Telp. & Fax. (031) 5944743 . Email : fia@unitomo.ac.id

Nomor : FIA. 102 /B. 2.04/XII /2021

Lampiran : -

Perihal : **Ijin Melakukan Penelitian**

Kepada

Yth

: **Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur**

Jl. Letjend. S. Paeman No. 55 Surabaya

Di -

Surabaya

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya, maka setiap mahasiswa wajib menyusun skripsi yang didukung oleh data penelitian, dengan adanya tersebut untuk melakukan penelitian maka dengan ini mohon di ijin mahasiswa kami :

Nama : **Alvia Nova Hariyani**

NIM : 2018020002

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Administrasi**

Judul Penelitian : **Analisis Kebijakan Tata Kelola Pergudangan Logistik dan Peralatan Kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Timur.**

Untuk dapatnya melaksanakan Penelitian di Kantor / Instansi yang Bapak / Ibu Pimpin.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 8 Desember 2021

Dekan,



Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd.

NIDN : 0712115201



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493
 SURABAYA – (60189)

Surabaya, 10 Desember 2021

Nomor : 070/ 12581 /209.4/ 2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian/Survei/Research

Kepada
 Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
 Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur
 di -
SIDOARJO

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya
 Nomor : FIA. 102/ B.2.04/XII/2021
 Tanggal : 08 Desember 2021

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ALVIA NOVA HARIYANI
 Alamat : Jl. Manyar Sabrangan 107-B RT. 005 RW. 002, Manyar Sabrangan, Mulyorejo,
 Surabaya /081331537220
 Pekerjaan/PST/PTN : Mahasiswa / **UNITOMO**
 Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survei/research :

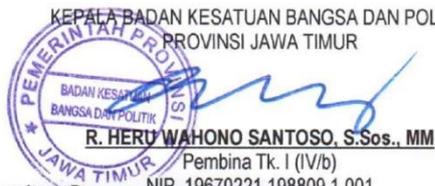
Judul : "Analisis Kebijakan Tata Kelola Pergudangan Logistik Dan Peralatan
 Kebencanaan Di BPBD Provinsi Jawa Timur"
 Tujuan/bidang : Mencari Data, Wawancara, Skripsi /Administrasi
 Dosen Pembimbing : Dr. HENDRO WARDONO
 Peserta : -
 Waktu : 3 Bulan
 Lokasi : BPBD Provinsi Jawa Timur

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survei/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TIMUR


R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos., MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19670221 198809 1 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran 3 : Foto Wawancara dan Observasi



Gambar 4.7 Foto Wawancara dan Observasi

Sumber : Dokumentasi Penulis